



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.732, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Rencana
Strategis. Tahun 2010-2014.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2010-2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kekuatan, kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa untuk menanggulangi setiap ancaman, yang memerlukan rencana pembangunan pertahanan negara dalam bentuk Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan;**
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, belum sepenuhnya memuat kebijakan strategis tentang percepatan pembangunan MEF pada tahap I Tahun 2010-2014 yang berbasis penguatan produksi dalam negeri, adanya kebijakan lainnya di bidang pertahanan dan keamanan serta kebijakan yang bersifat nasional sehingga perlu diselaraskan;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2011

- Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 13. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
 14. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan TNI;
 16. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kemhan;
 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Renja Kerja Pemerintah Tahun 2012;
 18. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014;
 19. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40);

20. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru;
22. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 681);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Rencana Strategis Pertahanan Negara merupakan dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk 5 (lima) tahun, berisi tentang proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam periode 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pasal 2

Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan Sublampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 dilengkapi dengan Sublampiran Khusus yang bersifat rahasia negara serta merupakan bagian terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan ini, maka Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2010-2014

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Bidang pertahanan negara mengalami dinamika sejak penetapan Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 melalui Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010. Hal tersebut menimbulkan kebijakan baru berdasarkan arahan dan intruksi Presiden pada saat memberikan pembekalan kepada Pimpinan TNI di Magelang tanggal 13 Juni 2011. Hal lain yang cukup mempengaruhi adalah realisasi tunjangan kinerja, kebijakan *zero growth* dan *right sizing* oleh Panglima TNI serta perkembangan sistem pendanaan dalam pemenuhan Alutsista TNI.
- b. Melalui proses analisis terhadap kebijakan dan strategi beserta implementasinya termasuk *strategic alignment*, postur pertahanan saat ini dibangun menuju tingkat *Minimum Essential Force* (MEF) telah menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional. Alokasi anggaran pertahanan Tahun 2005-2009 sebesar Rp 150.516,04 M (0,62%-0,85% PDB, rata-rata 0,75% PDB per tahun; atau 3,33%-4,53% APBN, rata-rata 3,95% APBN per tahun). Sedangkan alokasi pagu indikatif Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 sebesar Rp 279.862,47 M termasuk didalamnya alokasi Tahun 2010 sebesar Rp 42.310,14 M (0,72% PDB), dengan kenaikan rata-rata sebesar 14,51% per tahun.
- c. Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 yang diselenggarakan dalam kerangka rencana pembangunan jangka panjang dan mengacu kepada RPJM Nasional telah tercantum sasaran pembangunan pertahanan negara diantaranya tercapainya postur MEF, terbangunnya pos-pos pertahanan baru, kemandirian industri pertahanan, menurunnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut, terpantau dan terdeteksinya potensi tindak terorisme, serta terpantau dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional. Guna mewadahi dan mengantisipasi dinamika perubahan sehingga tepat sasaran dan tepat waktu, perlu dilakukan perubahan pada dokumen Renstra Hanneg Tahun 2010-2014.

2. **Maksud dan Tujuan.** Dokumen/naskah Renstra Haneg dan perubahannya dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara sampai dengan Tahun 2014, dengan tujuan agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai.
3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Ruang lingkup naskah merupakan proses dan penjelasan secara garis besar tentang perencanaan pembangunan pertahanan negara sampai dengan tahun 2014, dengan tata urut sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan.
 - b. Tugas, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
 - c. Lingkungan Strategis dan Permasalahan.
 - d. Kondisi Saat Ini.
 - e. Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan dan Prioritas Pembangunan.
 - f. Anggaran.
 - g. Tahapan Pembangunan.
 - h. Kemungkinan Risiko.
 - i. Penutup.
4. **Pengertian.** Pengertian sebagaimana tercantum dalam Sublampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II TUGAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5. **Tugas.** Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010, Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
6. **Visi dan Misi.** Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/268/M/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 ditetapkan Visi, Misi dan *Grand Strategy* pertahanan negara di lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2010-2014, sebagai berikut :
 - a. **Visi** : Terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh.
 - b. **Misi** : Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Keselamatan Bangsa.

7. Tujuan. Tujuan pembangunan pertahanan negara sebagai penjabaran visi dan misi Renstra Hanneg sebagai berikut :
 - a. Wilayah NKRI mampu menghadapi setiap ancaman.
 - b. Manajemen pertahanan yang terintegrasi.
 - c. Profesionalitas personel Kemhan dan TNI.
 - d. Teknologi pertahanan yang mutakhir dan dikembangkan secara mandiri.
 - e. Kemanunggalan TNI-Rakyat dalam bela negara.

8. Sasaran. RPJMN menetapkan sasaran pembangunan bidang Hankam yang dipilah untuk pembangunan Hanneg dan selanjutnya dijabarkan menjadi 26 sasaran.
 - a. Sasaran Pembangunan Hanneg dalam RPJMN :
 - 1) Terwujudnya postur pertahanan menuju kekuatan pokok minimum (MEF) yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penggentar.
 - 2) Terbangunnya pos-pos pertahanan baru di wilayah perbatasan darat, serta terbangunnya pos pertahanan baru di pulau-pulau terdepan (terluar) beserta gelar prajuritnya.
 - 3) Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan.
 - 4) Menurunnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut.
 - 5) Terpantaunya dan terditeksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme.
 - 6) Terpantaunya dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional.Sasaran pembangunan secara terinci sebagaimana tercantum pada Sublampiran khusus.
 - b. Sasaran pembangunan Hanneg dari RPJMN tersebut di atas dijabarkan menjadi :
 - 1) Meningkatnya pelaksanaan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang *up to date* dan akurat di lingkungan Kemhan.
 - 2) Meningkatnya industri, sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek.
 - 3) Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparaturnya Kemhan.
 - 4) Mewujudkan teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri.

- 5) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI memenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan Iptek serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang profesional.
- 6) Terwujudnya kebijakan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global.
- 7) Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepat waktu dan mampu memenuhi kebutuhan.
- 8) Meningkatnya jumlah kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap.
- 9) Meningkatnya masyarakat, sumber daya alam/buatan dan sarana prasana nasional berdaya guna secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.
- 10) Terwujudnya kekuatan pertahanan negara yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.
- 11) Terlaksananya fungsi dukungan manajemen dan operasional integratif dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan menuju MEF.
- 12) Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista, non Alutsista, organisasi, Doktrin, fasilitas dan sarana prasarana serta kekuatan pendukung, tegaknya hukum dan terjaganya keamanan wilayah laut, yurisdiksi nasional
- 13) Meningkatnya modernisasi dan peningkatan Alutsista serta fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI menuju MEF.
- 14) Terwujudnya profesionalisme dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan menuju MEF.
- 15) Terwujudnya kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.
- 16) Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista dan fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.
- 17) Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AD menuju MEF.
- 18) Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.

- 19) Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas serta meningkatnya daya tangkal dan daya gentar pertahanan di laut.
- 20) Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas, serta meningkatnya daya tangkal dan daya gentar sistem pertahanan negara di laut.
- 21) Kinerja organisasi semakin meningkat dan diawaki oleh personel yang berkualitas, profesional sesuai Satuan Kerja Perangkat (SKP) dan jumlah yang mencukupi sesuai Daftar Susunan Personel (DSP).
- 22) Meningkatnya kedisiplinan dan profesionalitas personel TNI AL, kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran, serta akuntabilitas dan optimalisasi kinerja.
- 23) Meningkatnya kedisiplinan dan profesionalisme, kelancaran operasional perkantoran, akuntabilitas, dan optimalisasi kinerja/laporan.
- 24) Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista, non Alutsista, organisasi, doktrin, fasilitas dan Sarpras serta kekuatan pendukung Matra Udara.
- 25) Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF.
- 26) Terpenuhinya profesionalisme personel matra udara sesuai DSP, peningkatan dan kesiapan personel.

BAB III LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

9. Umum. Berbagai aspek lingkungan strategis merupakan faktor yang dapat berpengaruh langsung terhadap penyelenggaraan pertahanan negara. Politik dan ekonomi negara akan menentukan kebijakan anggaran dan struktur pertahanan negara termasuk pengadaan Alutsista. Sedangkan permasalahan yang dihadapi bisa bersumber dari lingkungan strategis, baik kesalahan dalam memperkirakan maupun dalam menindaklanjutinya.
10. Perkembangan Lingkungan Strategis. Secara umum lingkungan strategis memiliki dua sisi. Pada satu sisi, telah terjalin berbagai kerjasama antar-negara maupun antar-kelompok negara guna memperoleh kemajuan di berbagai bidang. Pada sisi lainnya, persaingan antar-negara maupun antar-kelompok negara terus berlangsung guna mengamankan

kepentingan nasional/kelompok masing-masing. Persaingan ideologi, perebutan kekuasaan dan sengketa wilayah masih terjadi di berbagai tempat. Isu-isu demokratisasi dan hak asasi manusia juga masih berpengaruh kuat di bidang politik, hukum serta pertahanan keamanan. Sedangkan isu lingkungan hidup, termasuk pemanasan global dan bencana telah berpengaruh langsung terhadap bidang pertahanan dan keamanan serta menjadi ancaman nyata bagi kehidupan umat manusia. Perkembangan Lingkungan Strategis selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Sublampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11. **Perkiraan Ancaman.** Ancaman militer tetap terbuka kemungkinannya yang dipicu oleh perebutan wilayah dan sengketa perbatasan maupun gerakan separatisme. Ancaman non militer terus berlangsung dengan skala yang bervariasi, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkiraan ancaman selengkapnya, termasuk skenario ancaman yang paling mungkin terjadi sebagaimana tercantum pada Sublampiran Khusus.
12. **Permasalahan.**
 - a. Salah satu permasalahan dalam pembangunan pertahanan adalah belum dipenuhinya anggaran pertahanan sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan Postur Pertahanan Negara serta belum setaranya besaran anggaran pertahanan dengan negara-negara kawasan.
 - b. Permasalahan lainnya adalah lingkungan strategis yang sangat dinamis dan semakin kompleks pengaruhnya terhadap pertahanan negara. Pertahanan negara tidak hanya mencakup bidang militer, namun berkaitan erat serta memiliki saling ketergantungan dengan bidang-bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ataupun pergeseran kecenderungan dalam lingkungan strategis dapat terjadi hanya dalam hitungan bulan dan hari, namun kontinuitas kecenderungan juga dapat bertahan hingga beberapa dekade ke depan. Setiap fenomena/peristiwa menjadi penting untuk diantisipasi arah perubahan dan implikasinya. Permasalahan lebih lengkap sebagaimana tercantum pada Sublampiran Khusus.

BAB IV KONDISI SAAT INI

13. **Umum.** Uraian dalam kondisi saat ini merupakan penjelasan tentang kekuatan, kemampuan dan gelar, baik militer maupun nirmiliter. Data yang disajikan adalah hasil pengumpulan data maupun analisis dan evaluasi dari laporan yang diterima dari satuan-satuan jajaran serta

instansi terkait lainnya. Mengingat tingginya dinamika lingkungan strategis, validitas data perlu senantiasa dikonfirmasi dengan perkembangan terakhir.

14. Kekuatan.

a. Pertahanan Militer.

1) **Personel.** Kekuatan personel sebanyak 485.326 orang, terdiri atas prajurit TNI 417.268 orang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 68.050 orang.

2) **Alutsista/materiil.** Dari segi kuantitas dan kualitas perlu penataan dan peningkatan menuju sasaran yang ditetapkan, termasuk pangkalan, dermaga, pergudangan, dan sebagainya.

Data personel dan Alutsista/materiil secara lebih rinci sebagaimana tercantum pada Sublampiran Khusus.

b. Pertahanan Nirmiliter. Pertahanan nirmiliter dalam konteks pertahanan sipil yang menjadi tanggung jawab K/L sesuai fungsi masing-masing.

15. Kemampuan. Kemampuan pertahanan militer pada beberapa aspek mengalami peningkatan, namun perlu terus dibangun untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Sedangkan kemampuan pertahanan nirmiliter berada di masing-masing Kementerian/Lembaga. Uraian kemampuan secara rinci kemampuan pertahanan militer sebagaimana tercantum pada Sublampiran Khusus.

16. Gelar.

a. Gelar kekuatan TNI AD terdiri atas kekuatan terpusat, kekuatan kewilayahan dan kekuatan pendukung. Kekuatan terpusat TNI AD adalah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang mencakup satuan tempur (Satpur), satuan bantuan tempur (Satbanpur) dan satuan bantuan administrasi (Satbanmin), serta Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang mencakup Parako, Sandha dan Gultor. Sedangkan gelar kekuatan kewilayahan terdiri atas 13 Kodam, dan gelar kekuatan satuan pendukung mencakup Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan (Kodiklat).

b. Gelar kekuatan TNI AL diselenggarakan dalam kerangka Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang pelaksanaannya mengikuti pola Strategi Pertahanan Maritim Indonesia dalam gelar yang bersifat penyebaran kekuatan dan pengerahan kekuatan untuk tujuan penindakan, yang merupakan gelar permanen, mencakup satuan-satuan armada, pangkalan dan marinir.

c. Gelar kekuatan TNI AU diselenggarakan dalam struktur komando operasi udara dan komando pertahanan udara nasional yang meliputi unsur-unsur kekuatan pertahanan udara (Hanud), pemukul udara, dan pendukung.

- d. Sedangkan kekuatan pertahanan nirmiliter berada di masing-masing K/L dan belum terdata secara terpusat oleh Kementerian Pertahanan.

Uraian gelar pertahanan militer lebih rinci, termasuk gelar pasukan di wilayah perbatasan dan misi perdamaian dunia sebagaimana tercantum pada Sublampiran Khusus.

BAB V KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, KEGIATAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

17. Umum. Arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan merupakan kutipan dari dokumen RPJMN 2010-2014, sedangkan 14 butir sasaran adalah jabaran dari tujuan pertahanan negara yang terdapat dalam Keputusan Menhan Nomor : KEP/268/M/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009. Prioritas pembangunan (prioritas dan fokus prioritas) agar dipedomani oleh satuan-satuan di lingkungan Kemhan dan TNI serta instansi K/L lainnya dalam membangun pertahanan negara.
18. Arah Kebijakan. Sesuai yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2010-2014, terdapat 14 (empat belas) arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, dimana 10 (sepuluh) diantaranya merupakan arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan, yaitu :
 - a. Modernisasi Alutsista serta penggantian Alutsista yang umur teknisnya sudah tua dan membahayakan keselamatan prajurit.
 - b. Peningkatan profesionalisme SDM yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan.
 - c. Percepatan pembentukan Komponen Cadangan dan Pendukung.
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajurit TNI.
 - e. Pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan *Blue Print*, *Grand Desain* beserta *Road Map*, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya.
 - f. Intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut yang didukung oleh efektivitas komando dan pengendalian.
 - g. Pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme.

- h. Peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat.
- i. Pemantapan sistem persandian pertahanan untuk mendukung Sistem Persandian Nasional (Sisdina).
- j. Peningkatan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan negara.

Rencana strategi pertahanan negara tujuan, sasaran dan arah kebijakan Tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam Sublampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

19. **Strategi.** Strategi dalam pembangunan bidang pertahanan negara meliputi :

- a. Membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan secara terintegrasi menuju kekuatan pokok minimum (MEF). Dalam strategi ini, kekuatan dan kemampuan Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara terus dimantapkan dan dikembangkan secara optimal. Pemantapan dan pengembangan matra ini dilakukan dalam kerangka Tri Matra Terpadu yang mampu melaksanakan operasi gabungan, memiliki kekuatan dan kemampuan serbu (*striking force*) sebagai pondasi untuk membangun efek penggentar, termasuk di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
- b. Memantapkan gelar pasukan TNI di wilayah perbatasan, pulau terdepan dan wilayah penyangga dengan didukung pembangunan sarana dan prasarana pertahanan.
- c. Mendayagunakan industri pertahanan nasional dalam rangka meningkatkan kemandirian.
- d. Memadukan seluruh komponen dan kekuatan yang berwenang dalam penanganan gangguan keamanan dan penegakan hukum di laut.
- e. Menyempurnakan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme.
- f. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam pemantauan dan deteksi dini melalui modernisasi teknologi intelijen dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- g. Meningkatkan perlindungan informasi dan rahasia negara melalui peningkatan sistem tata kelola tertentu.
- h. Meningkatkan keterpaduan dan kapasitas lembaga penyusun kebijakan di bidang keamanan nasional.

20. **Program dan Kegiatan.** Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Renstra Haneg Tahun 2010-2014 Kemhan dan TNI mempunyai 26 program dan 214 kegiatan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran, yang telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 28 November 2011, Kemhan dan TNI mempunyai 26 program dan 198 kegiatan. Tabel dari program dan kegiatan Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 yang disertai dengan indikator, target kinerja dan besaran anggaran sebagaimana tercantum dalam Sublampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Program dan kegiatan yang tidak mendapat alokasi anggaran sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku tidak dicantumkan.

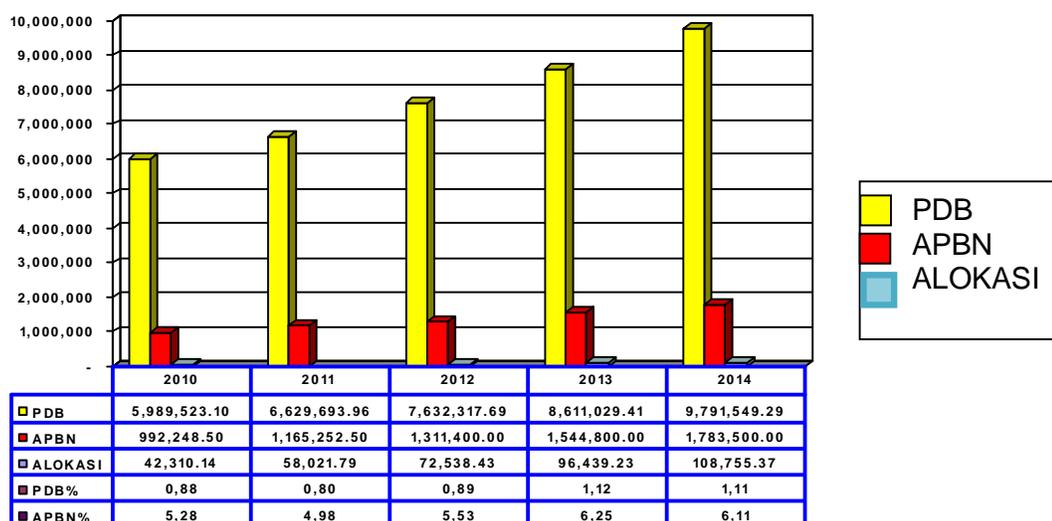
21. **Prioritas.** Dokumen RPJMN Tahun 2010-2014 menetapkan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya. Tiga prioritas lainnya (nasional) adalah pertama politik, hukum dan keamanan, kedua perekonomian dan ketiga kesejahteraan rakyat. Salah satu bagian dari prioritas Polhukam adalah bidang Hankam. Prioritas dan fokus prioritas bidang Hanneg sebagai berikut :
- a. **Peningkatan kemampuan pertahanan mencapai MEF Komponen Utama, dengan beberapa fokus prioritas yakni :**
 - 1) Meningkatkan profesionalisme personel.
 - 2) Modernisasi Alutsista.
 - 3) Percepatan pembentukan komponen cadangan dan pendukung
 - 4) Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar)
 - b. **Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dengan fokus prioritas pemberdayaan industri pertahanan nasional**
 - c. **Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (perompakan, *illegal fishing* dan *illegal logging*) dengan fokus prioritas meningkatkan operasi bersama dan mandiri di laut termasuk pengamanan Selat Malaka**
 - d. **Peningkatan rasa aman dengan fokus prioritas yaitu :**
 - 1) Deradikalisasi penangkal terorisme
 - 2) Koordinasi pencegahan dan penanggulangan terorisme
 - e. **Modernisasi deteksi dini keamanan nasional, fokus prioritas memperluas cakupan deteksi dini di luar negeri maupun dalam negeri**
 - f. **Peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional, dengan fokus prioritas peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan lembaga keamanan nasional.**

Program dan kegiatan dari prioritas dan fokus prioritas bidang Hanneg sebagaimana tercantum dalam Sublampiran E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI ANGGARAN

22. Umum. Anggaran Renstra Hanneg dalam dokumen RPJM Nasional Tahun 2010-2014 sebesar Rp 279.862,47 M dengan rincian Tahun 2010 sebesar Rp 42.321,14 M, Tahun 2011 sebesar Rp 44.883,00 M, Tahun 2012 sebesar Rp 55.469,58 M, Tahun 2013 sebesar Rp 64.292,37 M dan Tahun 2014 sebesar Rp 72.907,47 M. Realisasi anggaran Tahun 2010 sebesar Rp 52.352,25 M dan Tahun 2011 sebesar Rp 58.021,79 M (DIPA dan APBN-P). Sedangkan Tahun 2012 sesuai alokasi anggaran sebesar Rp 72.538,51 M dan Tahun 2013 dan Tahun 2014 sesuai dengan prakiraan maju sebesar Rp 96.593,30 M dan sebesar Rp 108.932,46 M. Dengan demikian anggaran Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 setelah perubahan pada Tahun 2011 menjadi sebesar Rp 388.107,15 M.

**GRAFIK PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN, ASUMSI PDB DAN
APBN RENSTRA HANNEG TAHUN 2010-2014**



23. Anggaran.

- a. Rincian per tahun per UO dari anggaran Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 sebesar Rp 388.107,37 M adalah :

TAHUN	UO					TOTAL
	KEMHAN	MBS. TNI	TNI AD	TNI AL	TNI AU	
2010	8.192,20	10.525,74	21.458,88	7.159,48	5.015,95	52.352,25
2011	4.351,76	6.064,00	27.552,87	11.420,48	8.632,68	58.021,79
2012	19.002,11	6.023,66	30.297,10	9.204,93	8.010,71	72.538,51
2013	22.983,28	10.106,03	33.856,31	15.505,78	13.987,83	96.439,23
2014	27.192,44	11.607,55	36.171,05	17.835,62	15.948,71	108.755,37
JUMLAH	81.721,79	44.326,98	149.336,21	61.126,29	51.595,18	388.107,37

Sedangkan rincian per program dan kegiatan dari anggaran Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 beserta prioritasnya sebagaimana tercantum dalam Sublampiran F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- b. PHLN/KE/KK. Sesuai dengan RPJMN 2010-2014 alokasi PHLN/KE/KK ditetapkan sebesar Rp 62,54 T. Realisasi Tahun 2010 mengalami beberapa perubahan dari rencana awal. *Shopping list* Alutsista TNI melalui PHLN/KE/KK Tahun 2010-2014 dan realisasi Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Sublampiran G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
24. Percepatan Pemenuhan Alutsista MEF. Untuk percepatan pemenuhan Alutsista MEF, Menteri Pertahanan mengusulkan anggaran sebesar Rp 50,00 T melalui Surat Nomor : R/115/M/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang permohonan ketersediaan anggaran percepatan pemenuhan kekuatan pokok minimal Alutsista TNI Tahun 2011-2014. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa alokasi untuk Tahun 2010-2014 adalah sebesar Rp 57,00 T, dimana sebesar Rp 7,00 T telah terdukung didalam DIPA Kemhan dan TNI Tahun 2010. Anggaran sebesar Rp 7,00 T tidak dirinci karena dinyatakan setelah penetapan DIPA Kemhan dan TNI Tahun 2010. Anggaran Tahun 2011-2014 sebesar Rp 50,00 T dirinci sebagai berikut :
- a. Tahun 2011 direncanakan dialokasikan sebesar Rp 11,00 T. Dalam pelaksanaannya didukung Rp 4,00 T, yaitu Rp 2,00 T melalui DIPA dan Rp 2,00 T melalui APBN-P, dengan *shopping list* sebagaimana tercantum dalam Sublampiran H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Tahun 2012 direncanakan dialokasikan sebesar Rp 12,00 T, didukung Rp 3,68 T melalui DIPA dan Rp 6,00 T melalui APBN-P. Rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam Sublampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. Tahun 2013 direncanakan dialokasikan sebesar Rp 13,00 T. Rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam Sublampiran J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - d. Tahun 2014 direncanakan dialokasikan sebesar Rp 14,00 T. Rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam Sublampiran J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
25. Revitalisasi Industri Pertahanan.
- a. Beberapa ketentuan tentang revitalisasi yang telah ada sebagai berikut :
 - 1) Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Menteri Pertahanan dan Menteri BUMN dan Panglima

- TNI dan Kapolri, dengan Nomor MoU : MoU/02/M/XII/2009, Nomor : MoU-18/MBU/2009, Nomor : KERMA/24/XII/2009, Nomor : B/42/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Revitalisasi Industri Pertahanan Dalam Negeri Tahun 2010-2014.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
 - 3) Permenhan Nomor 24 Tahun 2010 tentang *Master plan* revitalisasi industri pertahanan.
 - 4) Instruksi Menteri Pertahanan Nomor : Ins/01/M/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan.
- b. Untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan, Kemhan dan TNI mendapatkan alokasi PDN sebesar Rp 4,00 T dan RM sebesar Rp 3,10 T sesuai Keputusan Menteri PPN/Ka Bappenas Nomor : KEP.10/M.PPN/HK/01/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2010-2014. *Shopping list* Alutsista dan non Alutsista melalui pendanaan dalam negeri dan rupiah murni Tahun 2011-2014 dan realisasi Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Sublampiran K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
26. Wilayah Perbatasan. Pengelolaan wilayah perbatasan darat dan pulau kecil terdepan/terluar diarahkan dengan menambah pembangunan pos pertahanan wilayah darat dan pos pertahanan di pulau terdepan/terluar, memantapkan pos pertahanan di pulau terdepan/terluar beserta penggelaran prajurit serta survey dan pemetaan. Disamping itu, kepada prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan diberikan tunjangan khusus wilayah perbatasan.
- a. Anggaran pembangunan pos pertahanan serta survei dan pemetaan sebesar Rp 653,53 M, dengan rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam Sublampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Tunjangan khusus perbatasan diberikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan. Realisasi tunjangan khusus perbatasan pada Tahun 2010 dan 2011 dan rencana kebutuhan anggaran untuk Tahun 2012-2014 sebagaimana tercantum dalam Sublampiran M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB VII
TAHAPAN PEMBANGUNAN**

27. Tahun 2010.

- a. Terminologi/nomenklatur struktur program dan kegiatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran.
- b. Subkegiatan yang menonjol diantaranya :
 - 1) Pembangunan PMPP diawali pengadaan lahan di Sentul Bogor.
 - 2) Pengesahan Permenhan 02 Tahun 2010 tentang MEF komponen utama.
 - 3) Pengadaan Alutsista/Sarpras diantaranya :
 - a) Mabes TNI: 703 senjata berbagai jenis, 16.045 MKK, 3.277 MKB, 105 Musus, 526 Aloptik, 31 Alkomlek.
 - b) TNI AD : 13.747 senjata berbagai jenis, 8 Ranpur, 59 Ranmor, 225 Alang air, 152 Matzi, 2.360 Aloptik, 150 Alhub dll.
 - c) TNI AL : 1 Kapal tunda, 913 senjata berbagai jenis dan 122 Ranmor.
 - d) TNI AU : 714 senjata berbagai jenis, 14.100 munisi berbagai jenis, 505 Alkambang, 21 avionic berbagai tipe, 358 Komalbanav.
 - 4) MoU tanggal 15 Juli 2010 antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Pertahanan (MND = *Ministry of National Defense*) Korea Selatan tentang kerja sama pembangunan pesawat tempur KF-X/IF-X sebagaimana tercantum pada Sublampiran Khusus.
- c. Pagu definitif adalah sebesar Rp 42.310,14 M (sesuai SE Menkeu Nomor : 2679/MK.02/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Pagu definitif K/L Tahun 2010). Angka Rp 42.310,14 M digunakan sebagai *baseline* Tahun 2010, dan untuk memperkirakan besaran anggaran Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Hasil perkiraan anggaran digunakan sebagai *baseline* pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 tentang APBN Tahun 2010, belanja pertahanan negara menjadi Rp 52.352,25 M karena mendapatkan penambahan sebesar Rp 10.042,12 M dengan rincian :
 - 1) Penambahan dari BA 999 sebesar Rp 9.453,29 M meliputi :
 - a) Tunjangan kinerja sebesar Rp Rp 3.529,15 M.
 - b) Belanja lain-lain sebesar Rp 5.924,14 M, untuk :

(1)	Pengadaan Alutsista TNI	Rp	173,67 M
(2)	Pengadaan Alkes	Rp	20,00 M
(3)	Pelunasan BMP	Rp	5.484,41 M
(4)	Pengiriman pasukan TNI ke Haiti	Rp	63,82 M
(5)	Pengadaan Matsus Paspampres dan Kopassus	Rp	172,50 M
(6)	Sail Banda	Rp	9,74 M

- 2) Penambahan dari BA 12 sebesar Rp 588,83 M, untuk :
- | | | | |
|----|--|----|----------|
| a) | Tunjangan Operasi Pamtas dan Pulau kecil terluar sebesar | Rp | 152,98 M |
| b) | Pengadaan Alutsista TNI | Rp | 435,85 M |

Data penyaluran APBN-P sebesar Rp 435,85 M beserta rincian penggunaannya sebagaimana tercantum dalam Sublampiran N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

d. Rincian menurut Unit Organisasi dan Program sebesar Rp 52.352,25 M.

1)	Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Rp	25.071,90 M
a)	Kemhan	Rp	842,89 M
b)	Mabes TNI	Rp	823,00 M
c)	TNI AD	Rp	17.647,93 M
d)	TNI AL	Rp	3.837,67 M
e)	TNI AU	Rp	1.920,41 M
2)	Pengembangan Pertahanan Integratif	Rp	8.605,92 M
3)	Pengembangan Matra Darat	Rp	3.775,02 M
4)	Pengembangan Matra Laut	Rp	3.209,39 M
5)	Pengembangan Matra Udara	Rp	3.101,97 M
6)	Gak Kedaulatan & Keutuhan Wil NKRI	Rp	1.320,43 M
a)	Mabes TNI	Rp	1.257,10 M
b)	TNI AD	Rp	26,28 M
c)	TNI AL	Rp	36,68 M
d)	TNI AU	Rp	0,37 M
7)	Pembangunan Bela Negara	Rp	46,36 M
8)	Pengembangan Sistem & Strategi Han	Rp	447,20 M
9)	Pengembangan Industri Pertahanan	Rp	6.570,48 M
10)	Kerjasama Militer Internasional	Rp	115,27 M
a)	Mabes TNI	Rp	73,36 M
b)	TNI AD	Rp	14,94 M
c)	TNI AL	Rp	21,17 M
d)	TNI AU	Rp	5,80 M
11)	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan	Rp	24,35 M
a)	Kemhan	Rp	9,16 M
b)	Mabes TNI	Rp	1,56 M
c)	TNI AD	Rp	8,15 M

	d)	TNI AL	Rp	4,90 M	
	e)	TNI AU	Rp	0,58 M	
12)	Operasi Bhakti TNI				Rp 28,17 M
	a)	Mabes TNI	Rp	5,10 M	
	b)	TNI AD	Rp	14,67 M	
	c)	TNI AL	Rp	8,19 M	
	d)	TNI AU	Rp	0,21 M	
13)	Pendidikan Tinggi (Unhan)				Rp 35,80 M

28. Tahun 2011.

- a. Terminologi/nomenklatur program dan kegiatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran. Selanjutnya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 direvisi dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 28 November 2011. Revisi terdapat pada mekanisme otorisasi yang semula Kasum TNI sebagai Ka UO diubah menjadi Panglima TNI sebagai Ka UO.
- b. Subkegiatan yang menonjol diantaranya :
 - 1) Pembangunan Misi Pusat Perdamaian (PMPP) di Sentul Bogor. Rencana awal pembangunan PMPP *peace keeping center* dan *Stand by Force* (SBF) dikembangkan dengan penambahan fasilitas latihan untuk BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan *National Language Center*.
 - 2) Pengadaan tanah Yonkes Kostrad di Malang.
 - 3) Penandatanganan MoU tanggal 22 Maret 2011 antara Kementerian Pertahanan RI dan Badan Urusan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Industri untuk Pertahanan Nasional (SASTIND = *State Administration for Science, Technology and Industry for National Defence*) Republik Rakyat China tentang kerja sama industri pertahanan, pengembangan dan produksi sistem senjata pertahanan anti kapal perang sebagaimana tercantum pada Sublampiran khusus.
 - 4) Penandatanganan MoU tanggal 27 Juni 2011 antara Kementerian Pertahanan RI dengan PT DI tentang kerja sama pengembangan industri roket nasional RHan-122 sebagaimana tercantum pada Sublampiran Khusus.
 - 5) Percepatan pemenuhan MEF dengan pengadaan Alutsista/Sarpras diantaranya :
 - a) Mabes TNI : Senjata dan munisi berbagai jenis, Alkom, Alpalsus, 1 NASSuFS (Naval Air Surface Subsurface), 5 Sea rider, 1 CUVSS (Colour Under Vehicle Surveillance System).
 - b) TNI AD : 16 APS, 1 Jembatan Taktis *Medium Girder Bridge* (MGB), 18 Ranrik Meriam 105, 9 Ran

- munisi (5 ton), 2 Heli Serbu Bell-412, 2 Heli Serbu Bell-412DP1.
- c) TNI AL : 2 Kapal tunda, 4 Landing Craft Utility (LCU), 8 LCVP (*Landing Craft Vehicle Personnel*), 1 Kapal Bantu Cair Minyak (BCM), 1 Kapal Markas (MA), 1 Heli Angkut Bell-412, 2 Heli Angkut Bell-412 Tahap 2.
- d) TNI AU : 2 B-737 (ex PT GIA), Heli NAS-332 (diperkirakan masuk kekuatan 2013), 6 Engine Hawk 100/200, 4 Sucad AWP C-130/HS.
- c. Pagu definitif adalah sebesar Rp 47.498,50 M (sesuai SE Menkeu Nomor : 676/MK.02/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Pagu definitif K/L Tahun 2011). Khusus untuk pembangunan Sarpras PMPP, didukung sebesar Rp 282,93 M dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Sublampiran O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- d. Berdasarkan Surat Edaran Menkeu nomor SE 442/MK 02/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2011, anggaran Kementerian Pertahanan berubah menjadi sebesar Rp 50.033,87 M. Rincian penambahan tersebut :
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1) Percepatan Pemenuhan MEF sebesar | Rp 2.000,00 M |
| 2) Alat kesehatan sebesar | Rp 50,00 M |
| 3) Luncuran PDN sebesar | Rp 443,86 M |
| 4) Alkes kapal AL sebesar | Rp 41,51 M |
- e. Total anggaran pertahanan negara Tahun 2011 adalah Rp 58.021,79 M, dengan adanya tunjangan kinerja dan Tunkin ke 13 sebesar Rp 7.789,13 M.

29. Tahun 2012.

- a. Dokumen RKP Tahun 2012 menetapkan tema pembangunan bidang Hankam adalah "Percepatan peningkatan kinerja pengelolaan keamanan nasional dan penanggulangan tindak pidana, serta perwujudan pembangunan kekuatan pokok minimum bersinergi dengan industri dalam negeri".
- b. Subkegiatan yang direncanakan diantaranya :
- 1) Pembangunan PMPP (lanjutan).
 - 2) Pengadaan Alutsista/ Sarpras diantaranya :
 - a) Mabes TNI: 12 *Combat Boat*, 1 kapal pengangkut (ex Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP), 2 Ran munisi (5 ton), 2 Ran BBM 8000 LT, Revitalisasi Kapal ex ASDP.

- b) TNI AD : 3 *Anti Tank Guided Missile* (ATGM), 14 *Tank Transporter*, 25 *Panser Anoa*, 2 *Heli Serbu*, 36 *Ranrik meriam*, 2 *Rantis pendobrak/Breacher*.
 - c) TNI AL : 2 *Kapal tunda*, 1 *kapal BCM*, 2 *Heli angkut Bell*.
 - d) TNI AU : 24 *F-16* (diperkirakan masuk kekuatan Tahun 2012-2014).
- c. Pagu anggaran adalah sebesar Rp 64.437,00 M sesuai SE Menkeu Nomor : 215/KMK.02/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pagu anggaran Tahun 2012. Alokasi anggaran Tahun 2012 sebesar Rp 72.538,51 M sesuai SE Menkeu Nomor : 01/MK.02/2011 tanggal 1 November 2011 tentang Alokasi anggaran K/L Tahun 2012.
- d. Dalam alokasi anggaran tersebut terdapat subkegiatan-subkegiatan :
- 1) Percepatan Pemenuhan MEF sebesar Rp 3.683,14 M
 - 2) KF-X/IF-X sebesar Rp 100,00 M
 - 3) PMPP sebesar Rp 40,00 M
 - 4) Bang Wil perbatasan sebesar Rp 20,00 M
 - 5) KKIP sebesar Rp 4,00 M
 - 6) Gaji, kenaikan gaji, gaji ke 13, ULP dan uang makan PNS serta tunjangan kinerja (Tunkin), tidak termasuk Tunkin ke 13 dan lain-lain sebesar Rp 34.827,93 M.

Rincian Alokasi anggaran menurut Unit Organisasi dan Program sebesar Rp 72.538,51 M, sebagaimana tercantum dalam Sublampiran F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

30. Tahun 2013.

- a. Ketersediaan anggaran (*resource envelope*) Hanneg yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Renstra Hanneg Tahun 2010-2014, sebesar Rp 64.292,37 M.
- b. Subkegiatan yang direncanakan diantaranya :
 - 1) Pembangunan PMPP (lanjutan).
 - 2) Pengadaan Alutsista/Sarpras antara lain :
 - a) Mabes TNI: Senjata dan munisi berbagai jenis, 2 *Sea rider*.
 - b) TNI AD : 3 ATGM, 25 *Panser*, 20 *APC (Armour Personel Carrier)*, 18 *Meriam 105 mm*.
 - c) TNI AL : 6 *Heli Anti Kapal Permukaan (AKPA)*, 8 *Opslecker* (pengangkut tank), 2 *Kapal*

Angkut, 14 Peluncur roket Multi Laras R70 GRAD, 10 Combat Boat, 7 Exocet-40 Sigma, 2 Kapal patroli PC-40, 5 *Sea Rider*, 3 Torpedo A-244 Sigma, 5 tank BVP-2, 2 Kapal LCR.

d) TNI AU : 7 Pesawat pengganti F-5 tahap II.

c. Rencana kebutuhan sesuai perhitungan awal Renstra Hanneg 2010-2014 adalah sebesar Rp 64.292,37 M. Dalam perkembangannya terdapat kebutuhan tambahan sebesar Rp 32.146,86 M dengan rincian :

1)	Percepatan pemenuhan MEF sebesar	Rp 13.000,00 M
2)	Tunkin dan Tunkin ke 13 sebesar	Rp 7.814,88 M
3)	KF-X/IF-X sebesar	Rp 1.205,00 M
4)	PMPP sebesar	Rp 284,98 M
5)	Bang Wil perbatasan sebesar	Rp 99,69 M
6)	KKIP sebesar	Rp 8,53 M
7)	Kenaikan gaji, gaji ke 13, tunjangan perbatasan dan lain-lain sebesar	Rp 9.733,78 M

Dengan demikian rencana kebutuhan anggaran Tahun 2013 menjadi sebesar Rp 96.439,23 M sebagaimana tercantum dalam Sublampiran F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

31. Tahun 2014.

a. Ketersediaan anggaran (*resource envelope*) Hanneg yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Renstra Hanneg Tahun 2010-2014, sebesar Rp 72.907,38 M.

Subkegiatan pengadaan Alutsista/Sarpras yang direncanakan antara lain :

- 1) Mabes TNI: Senjata dan munisi berbagai jenis, 1 Meriam PSU, 3 Sea Hunter 12.
- 2) TNI AD : 16 APS, 20 APC, 1 Rudal Arhanud, 10 Heli Serbu, 2 Heli N Bell.
- 3) TNI AL : *Sea Rider*, *Combat boat*, 4 Exocet-40 Sigma, 2 Kapal patroli PC-40, 8 LCR, 10 Torpedo kapal selam, 12 Rudal C-802, 20 Rudal C-705 dan 1 Kapal patroli 28.
- 4) TNI AU : 5 Pesawat pengganti F-5 tahap III.

- b. Rencana kebutuhan sesuai perhitungan awal Renstra Haneg 2010-2014 sebesar Rp 72.907,38 M. Dalam perkembangannya terdapat kebutuhan tambahan sebesar Rp 35.847,99 M dengan rincian :
- | | | |
|----|---|----------------|
| 1) | Percepatan pemenuhan MEF sebesar | Rp 14.000,00 M |
| 2) | Tunkin dan Tunkin ke 13 | Rp 7.814,88 M |
| 3) | KF-X/IF-X sebesar | Rp 1.206,00 M |
| 4) | Bang Wil perbatasan sebesar | Rp 93,64 M |
| 5) | KKIP sebesar | Rp 9,81 M |
| 6) | Kenaikan gaji, gaji ke 13, tunjangan perbatasan dan lain-lain sebesar | Rp 12.723,66 M |

Dengan demikian rencana kebutuhan anggaran Tahun 2014 menjadi sebesar Rp 108.755,37 M, sebagaimana tercantum dalam Sublampiran F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII PENUTUP

32. Pernyataan Risiko. Kemungkinan risiko apabila kebutuhan anggaran pembangunan pertahanan tidak dipenuhi antara lain sebagai berikut :
- a. Terganggunya kepentingan nasional.
 - b. Berkurangnya daya tangkal bangsa.
 - c. Menurunnya posisi tawar bangsa Indonesia.
 - d. Tidak tercapainya visi dan misi.
33. Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 merupakan dokumen strategis lima tahunan sebagai acuan penyusunan perencanaan pembangunan pertahanan negara.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

SUBLAMPIRAN A DARI LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

PENGERTIAN

1. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis daya tersebut sebagai bahan masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa (Struktur Program Anggaran Tahun 2010).
2. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran (Struktur Program Anggaran Tahun 2010).
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
5. Pembangunan Pertahanan Negara adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI serta Kementerian dan Lembaga lainnya dalam rangka mencapai tujuan Pertahanan Negara.
6. Penyelenggaraan Pertahanan Negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara secara terpadu lintas sektoral dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga serta penyelenggara negara lainnya termasuk TNI.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra-K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
8. *Minimum Essential Force* yang selanjutnya disingkat MEF adalah suatu standar Kekuatan Pokok dan Minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.
9. *Flash Point* adalah bagian dari wilayah Indonesia yang diidentifikasi sebagai daerah memiliki potensi tinggi terjadinya berbagai ancaman aktual, sebagai dasar prioritas dibangunnya komposisi dan diposisi MEF secara bertahap dan berkesinambungan.

10. *Trilateral Meeting* adalah pertemuan tiga pihak dilakukan oleh Kementerian Negara PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan K/L dengan tugas menyampaikan sasaran prioritas pembangunan nasional dan kegiatan prioritas dengan target sasaran dan pendanaannya, kebijakan anggaran, arah kebijakan, rencana program/kegiatan prioritas termasuk kebijakan baru.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

SUBLAMPIRAN B DARI LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Global

- a. **Globalisasi dan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).** Dampak globalisasi yang menyentuh dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, hingga pertahanan dan keamanan, telah membawa pengaruh terhadap semua lini kehidupan manusia baik pada tingkatan individu, masyarakat maupun negara. Secara faktual, dinamika isu-isu keamanan yang berkembang pada lingkungan strategis internasional saat ini tidak terlepas dari dampak positif maupun negatif dari fenomena tersebut. Kemajuan pesat TIK secara khusus menghadirkan tantangan multidimensional bagi keamanan negara. Hal ini karena TIK tidak hanya membawa pengaruh terhadap sifat dan karakteristik perang masa kini dan mendatang, tetapi juga menyebabkan permasalahan yang dihadapi suatu negara senantiasa semakin kompleks. Teratasinya batasan-batasan ruang dan waktu akibat pesatnya kemajuan TIK, secara signifikan telah menyebabkan mudahnya informasi tentang kejadian di suatu negara bergerak menjangkau individu dan masyarakat di belahan dunia lain. Selain itu, kemudahan teknologi juga telah menyebabkan hadirnya sumber ancaman baru dalam dimensi *cyber* (dunia maya) baik dari aktor negara maupun non-negara, yang dilatarbelakangi oleh motivasi kepentingan individu, kelompok maupun negara.
- b. **Persaingan AS dan China.** AS menyadari bahwa hegemoninya mendapat tantangan serius dari China, yang memiliki potensi ekonomi untuk terus berkembang dan akan konsisten melakukan pembangunan kekuatan militer hingga mencapai kekuatan dan memiliki kapasitas yang mampu menandingi kekuatan riil AS. Dalam mempertahankan *status quo* hegemoninya, AS terus berusaha menjalin hubungan dengan negara-negara besar lainnya (*major powers*) yang sudah menjadi sahabatnya, yaitu Jepang dan Uni Eropa, selain terus berupaya mendekati India, dan menjinakkan Rusia serta membendung pengaruh China dengan strategi *containment*. Untuk menghambat perkembangan China, maka AS terus berupaya mengisolasi pengaruh China dan menutup aksesnya ke dunia internasional, terutama akses terhadap pemenuhan sumberdaya alam dan energi. Untuk memperoleh simpati dunia, kedua negara tersebut terus bersaing dan berusaha menjalin hubungan dengan memberikan bantuan pembangunan, kerjasama ekonomi, bantuan militer ke negara-negara terutama yang berkaitan dengan jalur yang berada dalam *sphere of influence*-nya. Dalam perspektif ini, maka dinamika persaingan kedua negara akan menjadi *key driver* yang mempengaruhi dinamika lingkungan strategis internasional hingga beberapa dekade ke depan, mulai dari isu militer,

ekonomi, politik, lingkungan hidup, teknologi hingga isu-isu keamanan non-tradisional yang menjadi kepentingan kedua negara.

- c. **Perekonomian Global.** Pasca krisis tahun 2008 yang bermula dari krisis finansial di AS, kondisi perekonomian global mulai memasuki tahap pemulihan sejak tahun 2010. Dalam proses pemulihan ini, pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan tetap lemah selama tahun 2011 dengan pertumbuhan sebesar 4,2%, menurun dari tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,9%. Kenaikan harga minyak dan berbagai komoditas perdagangan termasuk pangan, serta masih adanya krisis hutang di Eropa, berpotensi mengganggu pemulihan perekonomian global yang saat ini sedang berlangsung. Dalam waktu beberapa tahun ke depan, perekonomian global akan didorong oleh kemajuan ekonomi Asia, khususnya China dan India. Di kawasan Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi akan berkisar 5,7-6,0 persen, dengan motor penggerak Indonesia, Vietnam dan Singapura. Hal ini karena aktivitas ekonomi di kebanyakan negara berkembang telah menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara perlahan. Sebaliknya, banyak negara-negara maju (*high-income countries*) masih belum sepenuhnya berhasil mengatasi kondisi krisis akibat tekanan baru yang ditimbulkan dari langkah-langkah pemulihan dan restrukturisasi sebelumnya, sebagaimana yang dialami negara-negara Eropa menyusul krisis (*sovereign debt crisis*) di Yunani, Irlandia, Portugal dan lainnya.
- d. **Perubahan Iklim.** Dampak pemanasan global telah memunculkan fenomena perubahan iklim, mulai dari kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, penyakit baru, degradasi sumber daya alam, hingga masalah-masalah kelangkaan pangan dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada terjadinya bencana alam. Di berbagai kawasan telah terjadi fenomena cuaca ekstrim yang tidak hanya berdampak terhadap masalah lingkungan hidup, melainkan juga dalam tingkat tertentu juga berdimensi ekonomi. Dihadapkan dengan masih lambannya upaya global dalam memitigasi pemanasan global, kecenderungan munculnya berbagai dampak perubahan iklim dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya sangat potensial. Dampak yang dirasakan tiap-tiap negara/kawasan berbeda satu dengan lainnya, namun diperkirakan negara-negara kepulauan, mulai dari kawasan sekitar benua Afrika hingga Pasifik Selatan akan menerima dampak paling signifikan.
- e. **Keterbatasan Energi.** Pertambahan populasi penduduk dunia, laju roda pembangunan, serta belum efektifnya upaya diversifikasi sumber energi untuk kepentingan pembangunan, menyebabkan minyak dan gas bumi, semakin terbatas dan tetap menjadi sumber daya strategis yang semakin diperebutkan. Saat ini, produsen minyak bumi terbesar adalah kawasan Timur Tengah, sedangkan konsumen energi terbesar diantaranya adalah AS, Uni Eropa, China, Jepang, India, Rusia dan lainnya. Yang menimbulkan kekhawatiran dimasa mendatang adalah ketika konsumsi minyak dunia telah melampaui kemampuan produksi

secara global. Bahkan beberapa penelitian bahwa telah memprediksi bahwa ketidak seimbangan antara produksi dengan konsumsi minyak dunia telah terjadi. Dalam kondisi demikian, persaingan akan semakin tajam dan harga minyak global akan cenderung terus meningkat, tidak hanya karena faktor produksi melainkan juga faktor gangguan transportasi, iklim, permainan spekulasi, dan lain-lain. Akibatnya, kecenderungan persaingan penguasaan atau perebutan atas sumber daya energi strategis yang terus semakin menguat, secara langsung ataupun tidak langsung berpotensi terjadinya konflik antarnegara.

- f. **Isu Keamanan Non-Tradisional.** Ancaman keamanan non-tradisional akan tetap mendominasi isu-isu keamanan internasional, terutama negara-negara berkembang dengan sistem pengawasan yang cenderung lemah. Terorisme, penyelundupan senjata dan obat-obatan, penyelundupan manusia, perampokan dan pembajakan menjadi sumber gangguan keamanan yang belum memperlihatkan kecenderungan akan menurun. Dinamika isu keamanan non-tradisional lainnya yang menonjol adalah menguatnya upaya non-proliferasi senjata pemusnah massal yang saat ini ditempatkan sebagai salah satu isu krusial dalam permasalahan keamanan global, baik dalam kaitan dengan aktor negara seperti Korea Utara, Iran, dan lainnya maupun aktor non-negara, yakni kelompok terorisme internasional.

2. Regional

a. Kawasan Amerika

- 1) Dinamika politik dan keamanan di kawasan Amerika tetap dominan dipengaruhi oleh kebijakan AS. AS terus berupaya menguasai kawasan Amerika dengan mengontrol perkembangan Brasil sebagai *emerging power*, dan tetap mewaspadaikan pengaruh China yang berusaha menjalin hubungan lebih dekat dengan Brasil, dan sejumlah negara lain di Amerika Latin yang cenderung berseberangan dengan kebijakan AS.
- 2) Perkembangan lain di kawasan Amerika adalah menguatnya hubungan China, Rusia dan Iran dengan Venezuela akan menarik perhatian AS, karena kehadiran ketiganya akan berpengaruh terhadap ketergantungan negara-negara Amerika Latin terhadap AS. Kondisi ini akan mendorong kebijakan luar negeri AS untuk mencegah kehadiran *external power* masuk ke dalam kawasan yang berpotensi terjadinya ketegangan di kawasan.

b. Kawasan Eropa

- 1) Pengaruh Rusia dalam dinamika ekonomi, politik dan keamanan di kawasan terus meningkat, sejalan dengan tetap tingginya ketergantungan negara-negara Eropa terhadap pasokan gas dari Rusia. Kondisi ketergantungan tersebut mendorong perubahan sikap dan pendekatan Eropa, baik dalam Uni Eropa maupun NATO, yang terlihat semakin menempatkan Rusia sebagai mitra

sejajar dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, politik dan keamanan regional. Ke depan, bila kondisi ketergantungan pada Rusia tidak berubah, *leverage* politik dan adventurisme kebijakan politik luar negeri dan pertahanan Rusia di kawasan menjadi salah satu isu yang mendinamisasi permasalahan di kawasan.

- 2) Intensitas ancaman dan serangan terorisme di kawasan Eropa mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat dalam kasus di Inggris, Perancis, Jerman, dan Swedia. Adanya upaya meniru pola serangan seperti di Mumbai-India dan upaya melakukan serangan dalam waktu yang hampir bersamaan di beberapa negara Eropa, mengisyaratkan kemungkinan telah terjalinnya kontak dan koordinasi yang baik antara sel-sel teroris. Hal ini juga mengindikasikan terjadinya peningkatan kemampuan dan kepemilikan sumber daya serta dana yang signifikan. Ke depan, masalah keterlibatan negara-negara tersebut dalam operasi militer di Afghanistan dan Irak, serta kebijakan terhadap imigran atau kelompok minoritas yang beragama Islam menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan intensitas ancaman dan serangan terorisme di kawasan.
- 3) Dampak krisis ekonomi global masih dirasakan negara-negara Eropa, khususnya yang tergabung dalam Zona Euro. Pertumbuhan ekonomi regional masih mengalami tekanan, seiring dengan lambannya otoritas keuangan regional mengatasi permasalahan likuiditas di kawasan. Tekanan ekonomi regional yang kini dihadapi bersifat sistemik, sehingga diperkirakan krisis ekonomi tidak hanya dialami oleh Yunani, Irlandia, dan Portugal, melainkan juga akan menyebar ke negara-negara lain, seperti Italia dan Spanyol. Namun perlambatan pertumbuhan hingga ancaman melebarnya krisis yang masih cukup potensial, akan memaksa negara-negara di kawasan menekan pengeluaran belanja negara, termasuk dengan mengurangi anggaran pertahanan ataupun dengan menseleksi pengadaan alutsista. Ke depan, pengurangan anggaran pertahanan atau pemilihan program pertahanan secara selektif akan menjadi salah satu perkembangan menonjol pada tataran regional yang sangat potensial berdampak terhadap dinamika kerjasama pertahanan Eropa dengan negara-negara di dunia.

c. Kawasan Afrika

- 1) Kecenderungan hadirnya kekerasan dalam politik di Afrika masih cukup kuat yang menjurus pada kudeta, konflik bersenjata dan perang saudara, seperti yang terjadi di Kongo, Pantai Gading, Sudan, Somalia dan Tunisia. Dalam perkembangan terbaru, fenomena menguatnya tuntutan pergantian rezim (*regime change*) di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah yang dimulai dari Tunisia telah meluas (*domino effect*) ke berbagai negara lain, seperti Aljazair, Yaman, Bahrain, Mesir, Algeria, Libya, Arab Saudi,

Suriah, Maroko, dan lainnya, tidak hanya berdampak terhadap kawasan tersebut, melainkan juga membawa implikasi terhadap negara-negara kawasan lainnya, seperti China dan Korea Utara.

- 2) Kejadian perompakan dan pembajakan di sekitar perairan Teluk Aden mengalami penurunan, seiring dengan upaya global mengatasi gangguan keamanan maritim di kawasan tersebut. Namun wilayah operasi para perompak mengalami perluasan ke arah timur Samudera Hindia, sebagai akibat menguatnya respon masyarakat internasional terhadap gangguan keamanan di Teluk Aden. Aksi-aksi perompakan tersebut diperkirakan akan terus menjadi ancaman keamanan di masa mendatang, karena kontrol pemerintah Somalia atas wilayah tersebut sangat lemah.
- 3) Gerakan kelompok teroris yang berafiliasi dengan Al Qaeda semakin berkembang dan intens menyebabkan gangguan keamanan yang mendapat perhatian dunia internasional. Kasus sabotase, penculikan, pembunuhan terhadap warga asing, serta percobaan peledakan bom bunuh diri dan bom mobil seperti yang terjadi di Aljazair, Mauritania, Mali, Niger dan Maroko, merupakan indikasi menguatnya kekuatan dan penyebaran aktivitas terorisme di kawasan tersebut.

d. Kawasan Asia

- 1) Sub-Kawasan Asia Tenggara
 - a) Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara, menghadapi permasalahan internal, seperti terorisme, separatisme, dan konflik komunal antar suku, agama, dan golongan. Namun, kerjasama bilateral dan multilateral dalam kerangka ASEAN untuk mengatasi permasalahan tersebut cenderung semakin menguat.
 - b) Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara masih memiliki permasalahan dan sengketa perbatasan dengan negara tetangganya, termasuk masalah tumpang-tindih klaim di Laut China Selatan yang diklaim oleh empat negara ASEAN, yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei dengan China dan Taiwan. Belum dapat dituntaskannya masalah perbatasan ini akan berpotensi menjadi sumber konflik antarnegara di masa yang akan datang. Indonesia walaupun bukan termasuk negara yang menyatakan klaim terhadap wilayah tersebut, akan tetapi karena kedekatan geografis yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut, maka konflik di kawasan ini akan berpengaruh terhadap keamanan Indonesia.
 - c) Isu keamanan Selat Malaka yang tidak pernah surut dari keinginan negara-negara besar terutama AS, Jepang, China, dan Korea Selatan, untuk mengintervensi melalui kehadiran

militernya dengan dalih untuk pengamanan jalur internasional. Namun Indonesia dan Malaysia terus menolak kehadiran militer asing di Selat Malaka dengan meningkatkan kerjasama patroli keamanan yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

- d) Kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) ke depan masih merupakan ancaman nyata mengingat lemahnya pengawasan di perbatasan antarnegara karena belum diselesaikannya sengketa perbatasan dan adanya konflik internal di tiap-tiap negara.
 - e) Di sisi lain, pembangunan kekuatan militer (Malaysia, Singapura, Vietnam) di kawasan memicu terjadinya perlombaan kekuatan yang berpotensi menimbulkan ketegangan.
- 2) Sub-Kawasan Asia Tengah
- a) Besarnya potensi kandungan minyak dan gas bumi (*proven reserves*) menyebabkan Asia Tengah menjadi arena perebutan pengaruh oleh AS, Rusia, dan China. Keberadaan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) adalah upaya negara-negara di kawasan untuk menjalin kerjasama dalam menghadapi pengaruh AS.
 - b) Sebagai imbangannya, dalam rangka memelihara kehadirannya di kawasan tersebut, AS terus mempertahankan keberadaan pangkalan militernya di Kazakshtan dan Kirgizstan dengan dalih untuk menghadapi perang di Afghanistan.
- 3) Sub-Kawasan Asia Selatan.
- a) Dinamika politik dan keamanan Asia Selatan akan senantiasa dipengaruhi oleh ketegangan dan rivalitas antara India dan Pakistan. Tidak adanya kemajuan dalam penyelesaian konflik Kashmir, menguatnya kekuatan kelompok radikal di Pakistan, serta persaingan pembangunan kekuatan militer antara kedua negara, termasuk dalam hal senjata nuklir, merupakan faktor meningkatnya ketegangan di kawasan.
 - b) Pakistan merupakan *breeding ground for terrorist* internasional yang memiliki jaringan kuat dengan kelompok Taliban di Afghanistan sehingga menjadi perhatian AS dalam rangka perang melawan teroris. Kebijakan AS di Pakistan dan Afghanistan sering menimbulkan ketidakadilan dan kesengsaraan bagi masyarakat yang beragama Islam dapat menyebabkan sentimen anti-AS. Hal ini seringkali menjadikan simpati sebagian kelompok radikal di Indonesia.

- 4) **Sub-Kawasan Asia Barat**
 - a) Terjadinya kekerasan politik yang berdimensi perang saudara semakin menguat terutama di Iran, Irak, dan Afghanistan akan berpotensi terjadinya ketegangan di kawasan.
 - b) Keteguhan Iran dalam memperjuangkan haknya untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai telah menarik perhatian dunia dan menimbulkan pertentangan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu antara Rusia dan China yang berhadapan dengan AS dan Uni Eropa.
 - c) Belum adanya kemajuan perdamaian konflik Arab-Israel akan berpotensi menjadi sumber konflik di kawasan karena keberpihakan AS terhadap Israel akan menimbulkan sentimen anti-AS di kawasan, dan akan menarik perhatian kawasan lain yang didorong oleh sentimen agama.
- 5) **Sub-Kawasan Asia Timur.**
 - a) Dengan kemajuan ekonominya yang sangat pesat, China semakin berambisi untuk menjadi kekuatan regional dan berpotensi menjadi pesaing AS. Hal ini terlihat dari arogansi dan agresivitas China terhadap isu Taiwan, Laut China Selatan (SCS), sengketa perbatasan dengan Jepang, dan dukungannya terhadap Korea Utara.
 - b) Penyelesaian konflik Semenanjung Korea tidak mengalami kemajuan, bahkan intensitas ketegangan menunjukkan peningkatan yang semakin mengancam stabilitas di kawasan.
- 6) **Sub-Kawasan Australia dan Oseania**
 - a) Australia akan selalu mendukung kebijakan AS di Asia Pasifik, termasuk penempatan Pasukan Marinir AS di Darwin. Demi kepentingan AS, Australia tidak segan-segan mengorbankan kepentingan nasionalnya, sehingga kebijakan Australia sering dikendalikan oleh AS. Akibatnya, kebijakan Australia terhadap Indonesia dapat berubah tergantung kebijakan AS.
 - b) Australia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan akhir para pencari suaka politik dan imigran gelap dari berbagai kawasan, namun kebijakan Australia yang membatasi kehadiran imigran masuk ke teritorialnya, menjadikan wilayah Indonesia sebagai tempat persinggahan/sasaran alternatif para imigran gelap.
 - c) Australia terus melakukan pembangunan kekuatan militer melalui pembelian senjata canggih, termasuk dengan terus mengupayakan kerjasama sistem pertahanan Rudal dengan AS dan Jepang. Prioritas pembangunan kekuatan tersebut diarahkan dan direncanakan secara terus menerus hingga tahun 2030.

- d) Ikatan *Melanesian Brotherhood* mendorong kelompok negara-negara di kawasan Pasifik Selatan terus memberikan dukungan secara politik di dunia internasional terhadap gerakan separatis di Papua.

3. Nasional

- a. Ideologi. Kesadaran masyarakat terhadap ideologi Pancasila cenderung mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari kurang pedulinya sebagian masyarakat terhadap upaya kelompok radikal kiri dan radikal kanan yang ingin berusaha merubah ideologi Pancasila. Menurunnya tingkat kualitas masyarakat dan pemahaman Ideologi Pancasila menyebabkan semakin tumbuh berkembangnya radikalisme di masyarakat, yang gencar memanfaatkan kesenjangan sosial yang terjadi. Tidak tertutup kemungkinan apabila kondisi ini terus berlanjut, maka kemungkinan munculnya ideologi baru akan disambut baik oleh masyarakat.
- b. Politik.
 - 1) Dinamika politik yang berkembang di dalam negeri saat ini dirasakan belum stabil karena Indonesia sedang dalam era transisi menuju demokrasi, dimana infrastruktur politik belum siap, antara lain adanya peraturan perundangan yang belum disesuaikan dengan kehidupan demokrasi.
 - 2) Kebijakan tentang implementasi otonomi daerah berpotensi terjadinya ketegangan politik antara pusat dengan daerah dan antara daerah dengan daerah, terkait dengan masalah bagi hasil dan batas wilayah, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam.
 - 3) Lemahnya aparat hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik secara luas, menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, berpotensi menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- c. Ekonomi.
 - 1) Perkembangan ekonomi global yang masih diwarnai oleh dampak krisis ekonomi tahun 2008 akan selalu berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional. Kenaikan harga pangan dunia yang mencapai 30% dan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai diatas US\$ 100 per barel (asumsi APBN US\$ 80) akan mendorong kenaikan harga bahan pokok nasional yang berakibat pada laju inflasi.
 - 2) Dominasi asing terhadap perekonomian nasional terutama yang menyangkut harkat orang banyak (perbankan, penguasaan minyak dan gas, telekomunikasi) akan mengancam perekonomian nasional.

- 3) Belum siapnya infrastruktur ekonomi dan lemahnya daya saing industri dalam negeri untuk menghadapi pasar bebas mengakibatkan membanjirnya produk luar negeri yang berpotensi menghambat perkembangan ekonomi.
- 4) Dampak pemanasan global/perubahan iklim telah menyebabkan cuaca ekstrim yang mengakibatkan munculnya hama tanaman/penyakit baru, curah hujan tinggi, kekeringan, berakibat pada terjadinya gagal panen.

d. Sosial Budaya.

- 1) Kemajuan TIK telah meningkatkan kecerdasan masyarakat sehingga mendorong terjadinya mobilitas penduduk dari pedesaan menuju ke perkotaan yang menyebabkan kurangnya tenaga kerja pertanian.
- 2) Masuknya nilai-nilai asing karena semakin cepatnya interaksi antar manusia yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong munculnya sikap konsumerisme sebagian besar masyarakat.
- 3) Masih adanya kesenjangan sosial yang sangat tajam dikalangan masyarakat dan tidak adanya kepastian hukum yang jelas, serta masih tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, berpotensi terjadinya konflik sosial.
- 4) Letak geografis Indonesia yang berada dipertemuan antara lempeng Australia dan Asia dan posisinya pada *ring of fire*, mengakibatkan Indonesia sangat rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Di sisi lain, karena kerusakan lingkungan beberapa wilayah Indonesia sangat rawan bencana alam banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung.

e. Pertahanan dan Keamanan.

- 1) Resistensi separatis Papua, Maluku, dan Aceh secara militer menunjukkan penurunan, namun secara politik masih memperlihatkan aktivitasnya dan terus berusaha mengangkat isu-isu lokal untuk dijadikan konsumsi internasional.
- 2) Belum selesainya sebagian besar permasalahan perbatasan Indonesia dengan wilayah negara tetangga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah dan bisa sangat memungkinkan berkembang menjadi konflik antarnegara.
- 3) Lemahnya pengawasan di perbatasan yang masih bermasalah dengan negara tetangga dan tidak konsistennya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas berakibat pada meningkatnya kejahatan lintas negara.

- 4) Luasnya wilayah yurisdiksi nasional belum diimbangi dengan kekuatan pengamanan dan pengawasan yang memadai akan berpotensi terjadinya berbagai gangguan keamanan baik di darat, laut maupun udara nasional.
- 5) Belum terbongkarnya jaringan teroris internasional di Indonesia, dan masih berlanjutnya proses rekrutmen teroris, serta banyaknya narapidana teroris yang sudah selesai menjalani hukuman namun tidak termonitor keberadaannya sehingga kembali menjadi aktivis teroris, maka terorisme masih tetap menjadi ancaman aktual.
- 6) Belum terpenuhinya regulasi yang mengatur penyelenggaraan pertahanan negara, diantaranya tentang Keamanan Nasional, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, berakibat pada kurang efektifnya operasional komponen pertahanan negara.

**MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

PURNOMO YUSGIANTORO

3	5	4	3	6	7
	4. Perencanaan strategis dan operasional perusahaan tingkat.	4. Perencanaan strategis dan operasional perusahaan tingkat.	4. Perencanaan strategis dan operasional perusahaan tingkat.		
	5. Perencanaan strategis dan operasional perusahaan tingkat.	5. Perencanaan strategis dan operasional perusahaan tingkat.	5. Perencanaan strategis dan operasional perusahaan tingkat.		
	6. Perencanaan strategis dan operasional perusahaan tingkat.	6. Perencanaan strategis dan operasional perusahaan tingkat.	6. Perencanaan strategis dan operasional perusahaan tingkat.		
	7. Perencanaan strategis dan operasional perusahaan tingkat.	7. Perencanaan strategis dan operasional perusahaan tingkat.	7. Perencanaan strategis dan operasional perusahaan tingkat.		

1	2	3	4	5	6	7
			<p>c. Peringatan بمناسبة dan perhelatan lainnya</p> <p>d. Peringatan بمناسبة dan perhelatan lainnya (s.a. khilafah/funakional)</p> <p>e. Perhelatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p> <p>f. Perhelatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p>	<p>Memorandum untuk para pegawai dan keluarga yang akan melaksanakan perjalanan</p> <p>Memorandum untuk para pegawai dan keluarga yang akan melaksanakan perjalanan</p> <p>Memorandum untuk para pegawai dan keluarga yang akan melaksanakan perjalanan</p>	<p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p>	<p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p>
		<p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p> <p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p> <p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p>	<p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p> <p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p> <p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p>	<p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p>	<p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p>	<p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p>
		<p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p> <p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p> <p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p>	<p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p> <p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p> <p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p>	<p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p>	<p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p>	<p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p>
		<p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p> <p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p> <p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p>	<p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p> <p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p> <p>Perencanaan kegiatan keagamaan dan perhelatan lainnya (s.a. haji/wilayah/sampul)</p>	<p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p>	<p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p>	<p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p> <p>Surat Keputusan Menteri Agama</p>

1.	2.	3.	1.	3.	4.	5.
		<p>Terdiskonsinye indonnesia dan ppon npon ar 3. n sda a non k sillas/ boppye nahn bangka parr-ansian, sesawa, temolokact bebusian serta kerdampuan TT, AT dan n n MCT</p> <p>MCT n ppermen, vespa n bnt, sumber deya abau/ busan dan susans, vespa n n n n n rerdasy, klatx serta a c n n n n n n n n n penyengge n n n n n n n n n n n n n</p>	<p>Fasilitas pndaya, dan n n n n n n n n n Aluzata, dan Alubela, keallies serta Sanyas n n n n n n n n n n n n n n n n n n n</p> <p>Persewaan dan n n n n n n n n n n n n n skand/ busan, dan sda n n n n n n n n n bendasy, klatx serta n n n n n n n n n n n penyengge n n n n n n n n n n n n n</p>	<p>Mod n n n n n n n n n n n n n n n n n Alubela yang n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n</p> <p>Persewaan per n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n</p>	<p>Persewaan Alubela, serta n n n n n n n n n Alubela, busan, busan, busan, busan dan busan n n n n n n n n n n n</p>	<p>TELAD</p>
5	<p>Komponen n n n n n n n n n n n n n busan dan n n n n n n n n n n n n n busan</p>					<p>TELAD</p>

MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN										Jumlah	KST		
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020	
120	1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	1. Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
121	2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	2. Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
122	3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	3. Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
123	4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	4. Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
124	5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	5. Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
125	6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	6. Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
126	7. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	7. Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
127	8. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	8. Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
128	9. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	9. Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
129	10. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	10. Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
130	11. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	11. Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
131	12. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	12. Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
132	13. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	13. Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
133	14. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	14. Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
134	15. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	15. Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar.	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95

1	2	3	4	5
2	UMI AL-			
-	Sejumlah Profesi dan Pekerjaan: Matrik Dasar			
1486	Arhan Matrik Dasar	Penelitian dan pengembangan penelitian dan analisis data statistik, kemampuan komunikasi, kemampuan dan kemampuan (TKA) (Kognitif), MEK		Pasien baru yang dirawat, informasi tentang penanganan dan tindakan secara individu dan kelompok.
1487	Perencanaan Sistem Informasi	Penelitian dan analisis data statistik, kemampuan komunikasi, kemampuan dan kemampuan (TKA) (Kognitif), MEK		Pasien baru yang dirawat, informasi tentang penanganan dan tindakan secara individu dan kelompok.
2	UMI AL-			
-	Sejumlah Profesi dan Pekerjaan: Matrik Lanjut			
1500	Perencanaan Sistem Informasi	Penelitian dan analisis data statistik, kemampuan komunikasi, kemampuan dan kemampuan (TKA) (Kognitif), MEK		Perencanaan dan pelaksanaan dan kualitas dan standar (TKA) secara mandiri, pengembangan secara sistematis dan terpadu.
1505	Sistem Informasi	Penelitian dan analisis data statistik, kemampuan komunikasi, kemampuan dan kemampuan (TKA) (Kognitif), MEK		Perencanaan dan pelaksanaan dan kualitas dan standar (TKA) secara mandiri, pengembangan secara sistematis dan terpadu.
3	UMI AL-			
-	Perencanaan Profesi dan Pekerjaan: Matrik Lanjut			
1535	Perencanaan Sistem Informasi	Penelitian dan analisis data statistik, kemampuan komunikasi, kemampuan dan kemampuan (TKA) (Kognitif), MEK		Perencanaan dan pelaksanaan dan kualitas dan standar (TKA) secara mandiri, pengembangan secara sistematis dan terpadu.
1538	Perencanaan Sistem Informasi	Penelitian dan analisis data statistik, kemampuan komunikasi, kemampuan dan kemampuan (TKA) (Kognitif), MEK		Perencanaan dan pelaksanaan dan kualitas dan standar (TKA) secara mandiri, pengembangan secara sistematis dan terpadu.
1	Matrik Lanjut: Matrik Lanjut dan Matrik Lanjut			
1	MATRES TRI			
-	Medis Lanjut: Matrik Lanjut dan Matrik Lanjut			
1495	Perencanaan Sistem Informasi	Penelitian dan analisis data statistik, kemampuan komunikasi, kemampuan dan kemampuan (TKA) (Kognitif), MEK		Perencanaan dan pelaksanaan dan kualitas dan standar (TKA) secara mandiri, pengembangan secara sistematis dan terpadu.
1498	Perencanaan Sistem Informasi	Penelitian dan analisis data statistik, kemampuan komunikasi, kemampuan dan kemampuan (TKA) (Kognitif), MEK		Perencanaan dan pelaksanaan dan kualitas dan standar (TKA) secara mandiri, pengembangan secara sistematis dan terpadu.
1499	Perencanaan Sistem Informasi	Penelitian dan analisis data statistik, kemampuan komunikasi, kemampuan dan kemampuan (TKA) (Kognitif), MEK		Perencanaan dan pelaksanaan dan kualitas dan standar (TKA) secara mandiri, pengembangan secara sistematis dan terpadu.
1499	Perencanaan Sistem Informasi	Penelitian dan analisis data statistik, kemampuan komunikasi, kemampuan dan kemampuan (TKA) (Kognitif), MEK		Perencanaan dan pelaksanaan dan kualitas dan standar (TKA) secara mandiri, pengembangan secara sistematis dan terpadu.
1499	Perencanaan Sistem Informasi	Penelitian dan analisis data statistik, kemampuan komunikasi, kemampuan dan kemampuan (TKA) (Kognitif), MEK		Perencanaan dan pelaksanaan dan kualitas dan standar (TKA) secara mandiri, pengembangan secara sistematis dan terpadu.

SUBLEMBANG PEMBERANTARAN
 PERATURAN PERUBAHAN
 NOMOR 26 TAHUN 2014
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

**RINCIAN ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN
 RENSTRA HANNEG TAHUN 2010-2014**

NO KODE	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA					PRAKIRAN MAJU			JUNTAH	KET
		ALOKASI					2014				
		2010	2011	2012	2013	2014	2013	2014	2014		
A.	KEMRIAN	8.192,20	4.351,76	19.002,11	22.983,28	27.192,44	81.721,79				
1.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UO Kemhan	970,60	933,63	899,84	1.233,52	1.308,82	5.346,41				
1.1353	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya selain pelaksanaan Tugas Pokok IPTW Kemhan di Daerah		31,50	31,09	43,7	37,23	131,18				
2.1354	Pengembangan sistem informasi pertahanan negara		84,29	41,83	30,57	30,17	177,74				
3.1355	Pelayanan dan pembiasaan keuangan peralihan		22,98	21,31	27,73	29,73	101,75				
4.1357	Pelayanan administrasi hukum peralihan		3,15	3,25	5,19	5,17	20,79				
5.1358	Pelayanan rehabilitasi dan pemertahanan		20,79	18,48	27,45	24,16	95,77				
6.1359	Dukungan pelayanan umum UO Kemhan		218,87	187,87	248,75	237,15	882,54				
7.1360	Duk. pengkajian, pengas. aparatur UO Kemhan		161,70		190,79	201,11	556,20				
8.1361	Dukungan pendanaan dan pembelajaran pegawai UO Kemhan		278,01	463,96	327,31	383,07	1.452,95				
9.1362	Dukungan pemeliharaan dan pengembangan program kerja UO Kemhan		64,17	96,77	101,67	105,18	368,78				
10.1363	Dukungan Administrasi dan pelayanan pemeliharaan UO Kemhan		35,00	35,21	37,69	40,01	147,91				
11.1363	Pelayanan Komunikasi Publik		9,49	7,54	11,23	10,95	40,19				

NO KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI										JUMLAH	KET	
		RENCANA			PRAKIRAAN MAJU				5	6	7			8
		2010	2011	2012	2013	2014								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
			389,42	502,17	15.568,22	18.143,73	22.210,33	56.813,87					PB I	
1.	1366	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemhan		1,64	1,00	33,97	38,71	75,32						
2.	1367	Pengadaan barang pertahanan		4,23	6,49	7,83	7,31	25,86						
3.	1368	Kodifikasi materiil pertahanan		15,01	10,47	13,35	13,55	52,38						
4.	1369	Pengadaan jasa konsult. ds. pertahanan		27,23	30,00	30,94	27,45	110,87						
5.	1370	Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan		20,26	21,10	75,44	64,28	181,12					PB I	
6.	1371	Pengadaan barang dan jasa militer		24,05	15.481,42	17.795,67	21.796,67	54.798,81						
		a. Rupiiah Murni		-	38,00	-	-	38,00						
		b. PLM/KE		-	1.157,67	14.872,17	18.527,17	44.557,01						
		c. Rupiiah Murni Pendamping (Uang Muka KE)		-	4.285,75	2.624,50	3.269,50	10.179,75						
7.	1372	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Kemhan Kemhan		7,76	7,69	18,53	18,21	52,19						
		Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemhan	12,18	19,83	21,68	27,05	29,70	110,44						
1.	1373	Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Kemhan		14,21	15,93	20,37	21,30	53,75						
2.	1374	Pengawasan umum Kemhan/TNI		1,36	1,39	1,58	2,14	6,53						
3.	1375	Pengawasan pengakuan Kemhan/TNI		1,42	1,45	1,76	2,18	6,67						
4.	1376	Pengawasan keuangan Kemhan/TNI		1,49	1,53	1,71	2,11	6,83						
5.	1377	Pengawasan logistik Kemhan/TNI		1,35	1,38	1,60	1,97	6,36						
		Penelitian dan pengembangan Kemhan	17,40	126,39	143,81	1.248,87	1.255,93	2.792,40					PB II	
1.	1378	Penelitian dan pengembangan strategi pertahanan		2,40	2,40	4,80	5,20	16,50						

NO KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI								Jumlah	KET
		RENCANA				PEKERJAAN MAJU					
		2010	2011	2012	2013	2014	2013	2014	2014		
1	3									9	U
2	Pembelian dan pengembangan alat peralatan penelitian		5,12	25,00	1,2	5,44	1,218,95			2,464,81	U
3	Pembelian dan pengembangan PPTK penelitian		106,50	103,72		11,92	13,70			235,85	
4	Pembelian dan pengembangan bahan kimia penelitian		1,54	1,55		3,25	6,87			14,31	
5	Pink mentoring dan diskusi dengan dosen terkait alat dan bahan penelitian		10,50	11,07		11,45	12,81			45,83	
5	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemahasiswaan	71,06	166,48	157,38	170,84	177,04				742,80	
1	Pendidikan dan pelatihan bahasa		8,95	4,36		9,82	10,35			43,53	
2	Pendidikan dan pelatihan manajemen		5,68	5,52		6,83	7,22			25,33	
3	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan kebahasaan		6,25	6,56		6,89	7,34			25,97	
4	Penyempurnaan Pendidikan Tinggi Perencanaan		124,14	114,19		119,59	121,99			480,11	
5	Durungan dan diskusi dan pelaksanaan tugas teknis alanya Backlist kemahasiswaan		21,46	20,70		27,43	30,24			99,83	
6	Strategi Pertahanan	34,13	60,87	47,97	92,17	94,50				329,64	PB V & PB VI
1	Analisis Strategis		7,47	6,22		9,30	9,69			30,77	PP/PA
2	Perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif		7,18	6,75		7,11	6,51			28,59	PP/PA
3	Kemassama Internasional		6,7	6,84		25,15	17,82			36,58	PP/PA
4	Forum dan seminar pengajaran konsep Pertahanan Negara		3,07	3,09		7,18	8,07			21,41	PP/PA
5	Perumusan kebijakan pertahanan negara		10,58	8,10		10,25	9,70			38,63	PP/PA
6	Pengembangan wilayah pertahanan		3,43	3,15		2,83	5,04			16,77	PP/PA
7	Dukungan dan pelaksanaan tugas teknis alanya Dikti, Stasi dan Kemahasiswaan		22,08	12,98		30,73	36,57			102,76	PP/PA

NO KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI							Jumlah	KET
		RENCANA		2013			2014			
		2010	2011	2012	2013	2014	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7	Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	5.835,47	252,00	33,84	49,02	45,73	6.216,06			
1	202 Administrasi, Kelembagaan, & Logistik	2.227,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.227,00			
2	1395 Pengendalian Program dan Anggaran	2,88	1,01	3,95	3,97	4,18	4,18			
3	1397 Perencanaan Penganggaran, Pertahanan	2,54	3,49	5,67	5,13	6,83	6,83			
4	1398 Perencanaan Penganggaran, Angkatan	203,78	5,20	5,19	5,80	5,80	236,07			
5	1399 Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pertahanan									
6	1400 Publikasi, manajemen dan pelaksanaan tugas teknis/kuratif Dajen Bahan Berbahaya		33,58	13,71	31,96	28,71	134,06			
8	Pengembangan teknologi dan industri pertahanan	800,00	2.042,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	7.642,56	PB II		
1	1401 Suluksi Al. sasi dalam negeri dan pengembangan paka industri pertahanan		2.042,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.842,56	PP 1, II		
2	a. Rupa Bumi		700,00	800,00	800,00	800,00	3.100,00			
3	b. ITN		1.342,56	800,00	800,00	800,00	3.742,56			
9	Potensi Pertahanan	24,03	89,32	42,19	174,98	221,47	531,99	PB I		
1	1402 Penelitian kekeluargaan		3,08	2,55	5,00	6,25	7,88	PP 3, I		
2	1403 Penelitian, kesaling, dan kerjasama		1,28	1,50	5,66	5,57	21,11	PP 3, I		
3	1404 Pembentukan dan pemukiman komponen keluarga		3,59	3,76	9,10	8,30	21,69	PP 3, I		
4	1405 Pascaan dan pembinaan komponen pendukung		3,56	3,30	5,80	5,90	19,65	PP 3, I		
5	1406 Pembinaan potensi teknologi dan industri pertahanan		37,01	13,00	132,01	169,35	352,87			

NO KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI										JUMLAH	KET			
		RENCANA		2012				2013						PRAKIRAAN MAJU		
		2010	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	8	9			10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
6.	1407	Duk manajemen dan pelaksanaan tugas teknis antara Ditjen Polhans Kesehatan		17,80	10,94	18,51	21,50	71,75								
10	Kekuatan Pertahanan	37,91	178,50	487,18	243,10	248,92	1.155,61									
1.	1408	Pembinaan, fasilitas, dan jasa pertahanan		51,56	452,70	174,13	861,00									
2.	1409	Pembinaan, fasilitas, pertahanan		58,09	19,16	43,04	160,58									
3.	1410	Pembinaan, Materiil Pertahanan		3,89	3,93	3,70	19,47									
4.	1412	Pembinaan, personel pertahanan		12,81	12,30	14,01	54,47									
5.	1413	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis antara Ditjen Kesehatan		31,75	7,78	8,20	56,18									
B.	MAHES TNI	10.525,74	6.064,00	6.023,66	10.106,03	11.607,55	44.326,98									
23	Penyelenggaraan manajemen dan operasional integratif	8.560,35	2.862,45	3.175,35	5.981,84	6.860,97	27.330,86									
1.	1409	Penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel integratif		1.001,12	1.222,34	3.050,19	9.161,17									
2.	1410	Penyelenggaraan operasional pertahanan		1.620,18	1.710,96	2.280,18	8.611,46									
3.	1411	Penyelenggaraan pendidikan/ perawatan pertahanan integratif		209,28	219,15	224,08	898,99									
4.	1412	Perawatan sarana dan prasarana		19,37	20,30	21,72	85,38									
5.	1413	Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja integratif		2,50	2,30	2,67	10,61									
11	Penggunaan kekuatan pertahanan integratif	1.481,34	1.561,42	1.788,79	1.914,03	2.105,41	8.850,99									
1.	1414	Operasi Militer untuk Perang (OMP)		937,97	1.103,20	1.180,43	4.590,07									
2.	1415	Operasi Militer Selain Perang (OMSP)		532,76	585,23	627,28	2.436,27									
3.	1416	Ops Gabuk dan Ops Yustis		18,35	20,19	21,60	83,90									
4.	1417	Operasi intelijen dan strategis		31,80	34,97	37,32	145,35									

NO KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI										JUMLAH	KET
		2010		RENCANA		2012		PRAKIRAAN MAJU		2013	2014		
		4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
5	418 Operasi SAR TNI		6,36	7,20	7,70	8,47	29,93						
6	419 Operasi Bantuan TNI		11,65	12,50	13,38	14,71	52,21						
7	420 Operasi Pembudayaan Wilayah Perbatasan		8,09	10,00	10,70	11,77	41,46						PP 5/IV
8	421 Pemeliharaan Alutsista Integratif		8,34	9,00	9,63	10,60	37,57						
9	422 Pemeliharaan non Alutsista Integratif		5,00	5,50	5,89	6,47	22,86						
12	Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpas Integratif	280,09	1.418,11	741,42	1.969,68	2.265,65	6.675,95	PB 1					
1	423 Pengadaan Rantis, Stesid Rapur dan Sural Bantik		12,98	11,12	50,85	55,93	130,88						
2	424 Pengadaan Non-Alutsista/Sarpas		25,74	2,10	31,72	34,89	94,75						
3	425 Pengadaan MTK		13,00				3,00						
4	426 Pengadaan Manas Khusus		288,91	212,21	82,58	90,84	674,34						
5	427 Pengadaan Manas Khusus		53,63	59,96	124,36	136,80	374,75						
6	428 Pengadaan MKB		33,27		79,19	87,11	219,57						
7	429 Pengadaan Sarpas		40,57	91,09	37,54	41,90	210,50						
8	430 Pengadaan Non Alutsista		9,00	62,16	63,44	69,78	201,38						
9	431 Pembangunan Sarpas Pendukung		921,01	302,48	1.800,00	1.750,00	4.473,49						
10	432 Pengadaan Alutsista Strategis Integratif		124,87	-	-	-	124,87						
	a. Kupiah Nurni Pendamping (Uang Muka KPI)		707,52										
	b. PUN		88,52										
	c. Percepatan MKB 3 Rensira		302,48	1.500,00	1.750,00	1.750,00	3.641,00						
13	Profesionalisme Prajurit Integratif	203,96	232,02	318,20	340,48	374,32	1.469,18						
1	433 Pendidikan Pertama Diklat Perwira TNI Wersing		91,69	104,95	111,98	123,17	430,80						
2	434 Pendidikan pengembangan/sosialisasi		78,98	90,83	97,18	105,90	373,89						

NO KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI										Jumlah	KET
		RENCANA				PRAKIRAN MAJU							
		2010	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
1	3	4	5	6	7	8	9	10					
1435	Sarana Keselamatan Operasional/ Mitra Internasional		27,29	18,59	51,09		37,19				150,06		
1436	Sarana Pemfungsian Pabrik/ PTN		6,50	7,77	8,09		8,89				30,77		
1437	Sarana Pemasangan Ovens		1,37	1,37	1,68		5,19				19,97		
1438	Pengembangan Sarana Pabrik Profesionalisme Pegawai		26,88	64,25	66,65		73,31				220,12		
C.	TNI AD	21.458,86	27.552,67	30.297,10	33.856,31		36.171,05				149.386,21		
24	Pengembangan Manajemen dan Operasional Mitra Darat	18.602,21	23.307,03	26.394,47	27.342,48		27.805,55				123.451,69		
1	Pengembangan Pemasaran Personel Mitra Darat		21.753,56	24.767,1	26.411,2		26.511,3				97.173,24		
2	Pengembangan Pemas. Mitra Darat		79,31	8,64	84,52		92,66				31,23		
3	Pengembangan Kepelatihan Militer Mitra Darat		-0,00	1,05	2,10		2,21				6,46		
4	Pengembangan Pendidikan Militer		3,35	3,46	3,59		3,87				14,29		
5	Pengembangan Administrasi Personal Pengkajian/pelaksanaan pelatihan		270,61	21,24	29,76		112,77				319,41		
6	Pengembangan Fasilitas dan Sarpras		152,81	142,84	433,68		461,94				1.191,29		
7	Pengembangan Administrasi, Atributasi dan Dukungan Bekerja		945,81	948,94	1.214,56		1.311,13				4.420,54		
8	Pengembangan Pemas dan Pemas		6,81	6,81	9,26		10,18				33,03		
9	Pengembangan Administrasi Umum		267,73	269,68	39,11		263,49				800,54		
10	Pengembangan administrasi pembinaan, pembinaan, pengorganisasian dan kerjasama		4,01	6,71	4,21		4,53				19,56		
11	Pengembangan Pemasaran dan Pemasaran		2,96	2,09	20,30		11,03				26,03		

NO KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI								JUMLAH	KET
		RENCANA		2012				PRAKTIK MAJU			
		2010	2011	2012	2013	2014	2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
14	Dukungan Kesiapan Matra Darat	2.020,20	487,09	477,11	617,96	738,24	4.349,60				
1.	1444 Penyelenggaraan Insinyur dan Pengamanan Matra Darat		36,08	56,08	58,88	64,77	235,81		FP 3/IV		
2.	1445 Kegiatan Alutsista Matra Darat		9,36	1,26	9,66	7,26	22,09				
3.	1446 Penyelenggaraan Saran dan Pompaan		2,68	3,36	2,82	3,10	11,96				
4.	1447 Pemeliharaan / Perawatan Rempul		35,16	23,16	34,82	38,30	120,44				
5.	1448 Pemeliharaan / Perawatan Pesawat Terbang		55,91	48,90	131,87	204,17	441,05				
6.	1449 Pemeliharaan / Perawatan Alat Angkut Air		34,46	30,96	36,18	39,80	111,40				
7.	1450 Pemeliharaan / Perawatan Senjata dan Munisi/Alap		35,18	35,18	36,96	40,64	147,96				
8.	1451 Pemeliharaan / Perawatan Non Alutsista		179,04	181,02	187,99	206,79	754,82				
9.	1452 Penyelenggaraan Kegiatan Technical Matra Darat		49,80	22,50	52,29	57,50	182,20				
10.	1453 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Darat		7,30	6,02	7,38	8,67	30,07				
11.	1454 Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra Darat		8,53	21,49	8,96	9,86	48,84				
12.	1455 Pemeliharaan dan perawatan Kesantian dan fasilitas latihan tempur		2,23	2,23	2,07	2,83	9,86				
13.	1456 Nasional Menghadi Kekuatan Portabalar		-	27,84	33,11	36,13	97,38				
14.	1457 Penyelenggaraan OMSP		16,02	17,02	16,82	17,56	67,52				
15	Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Matra Darat	366,34	3.143,91	2.514,06	5.136,83	6.838,45	18.019,59		PBI		
1.	1458 Pengadaan / Penggantian Rempul Tempur		-	95,00	15,10	23,10	133,50		FP 2/I		
2.	1459 Pengadaan / Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)		-	66,00	501,05	615,13	1.182,22		FP 2/I		

NO KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI								Jumlah	KET
		RENCANA			PRAKTIKAAH MAJU						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3	1450	Perkembangan / Pengembangan Alat Angkut Air			50,00	80,00		112,00		242,00	
4	1451	Perkembangan / Pengembangan Sarung dan		373,20	157,00	99,03		138,65		667,92	FP 2/1
5	1452	Perkembangan / Pengembangan Material Alusidre		126,76	103,00	210,19		45,00		688,95	
6	1453	Perkembangan / Pengembangan Material Alusidre		59,50	144,63	218,40		535,86		952,39	
7	1454	Pengembangan Fasilitas Sarana dan		190,00	307,93	1.007,72		1.710,81		3.216,46	
8	1455	Pengembangan / Pengembangan Strategi Mitra Darat		2.301,41	528,36	2.090,60		3.250,10		10.370,77	FP 2/1
		8. Kupat Muani / Mendamping (Lump Muka		251,81						251,81	
		RE)		426,94						1.426,94	
		6. Pengembangan MEZ & Rousia		6.22,66	1.528,50	3.000,00		2.500,00		6.401,16	
16	Peningkatan Profesionalisme Personel		441,13	614,84	911,46	759,09	788,81	3.515,83			
1	1466	Latihan Mitra Darat		99,66	253,27	93,34		98,00		544,27	
2	1467	Latihan Bersama Instruktur		6,98	13,53	7,55		9,05		37,11	
3	1468	Pendidikan Perencanaan Mitra Darat		341,27	426,44	403,36		407,00		1.580,11	
4	1469	Pendidikan Pembentukan Mitra Darat		67,93	100,38	80,47		85,51		334,30	
5	1470	Pendidikan Pengembangan Kurikulum Rutin		16,40	30,33	17,77		19,54		84,04	
6	1471	Pendidikan Pengembangan Spesialisasi		39,18	29,17	47,26		40,99		147,60	
7	1472	Pendidikan Profesi dan Keahlian Mitra		43,45	40,84	61,28		61,35		206,92	
8	1473	Pembangunan Sarana-Prasarana			15,94	58,06		60,96		134,96	
		Profesionalisasi Personel Mitra Darat									

NO	NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					JUMLAH	KET
			RENCANA		PRAKIRAAN MAJU				
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D.		TN.LAL	7.159,48	11.420,48	9.204,93	15.505,78	17.835,62	61.126,29	PB I & V
17		Dukungan Kesiapan Mitra Laut	1.170,27	985,23	1.078,82	1.591,11	1.508,90	6.434,33	PP 1/1
1	1-85	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kurikulum		1,01	8,55	9,00	10,23	31,79	
2	1-85	Mata Kuliah		8,50	8,55	1,50	1,72	20,28	
3	1-87	Pengembangan Uji Kelengkapan Materi dan Pasihias Mitra Laut		1,75	1,84	2,50	2,88	8,97	
4	1-88	Perencanaan/Perawatan Peralatan Komplek		25,16	19,45	20,75	27,35	93,72	
5	1-89	Perencanaan/Perawatan Peralatan Senlak dan Antonasi		5,25	5,51	7,00	8,05	25,81	
6	1-90	Perencanaan/Perawatan KRI/Alpung dan Ranpar/Kantis		825,00	888,75	1.362,36	1.311,19	4.407,30	
7	1-91	Pengembangan OMSP Matra, Gaskum dan Jaga Kamla di wilayah laut Yurnas		29,06	30,51	60,00	58,00	188,57	PP 1/1
8	1-92	Ujihangam Matra Laut		10,00	27,63	28,00	33,45	99,08	
9	1-93	Pengembangan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut		20,00	20,65	32,50	37,63	118,78	PP 1/1
10	1-94	Pengembangan Penuberkysan Wilayah Perumahan Laut		8,00	8,40	10,00	11,50	37,90	
11	1-95	Perencanaan/Perawatan Pesud		47,50	50,98	57,80	65,88	222,16	

NO KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI										JUNJAH	KET
		RENCANA			2012				PRAKIRAAN MAJU		2014		
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut	820,25	4.290,74	1.084,01	5.875,50	6.939,85	19.010,35	PB 1					
1405	Peningkatan/penyediaan Fasilitas dan Sarpras		225,00	335,00	875,00	1.240,00	2.725,00	RP 2/1					
2	1407	Peningkatan/penyediaan Peralatan Serta Hubs (Pusat Sasaran)		15,00	35,40	15,30	17,00	63,40					
3	1408	Peningkatan/penyediaan Perawatan Kompos		17,84	70,00	12,30	15,00	54,84					
4	1409	Peningkatan/penyediaan Service dan Asuransi		40,00	20,16	22,30	25,00	110,86					
5	1500	Peningkatan/penyediaan ERP/Alpura dan Rantai Pasok (Pusat Sasaran)		670,16	155,00	190,00	297,50	1.308,81	FP 2/1				
6	1501	Pengadaan dan Materiil Non Alutsista Matra Laut		330,51	223,00	745,00	1.105,00	2.403,51					
7	1502	Pengadaan Alutsista Stereops Matra Laut (Pusat Sasaran)		3.865,11	312,30	5.000,00	4.230,00	11.407,41	FP 2/1				
		a. Rencana Kerja/Annamang (Rak Muka KE)		374,90	-	-	-	374,90					
		b. PLM		80,00	-	-	-	80,00					
		c. Penerimaan MEF & Keatras		665,86	312,30	5.000,00	4.250,00	9.252,16					
8	1503	Peningkatan/penyediaan Pesawat (Pusat Sasaran)		33,19	23,15	25,00	30,00	111,37					
19	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	282,93	315,89	326,80	405,50	478,75	1.809,87						
1504	Pendidikan dan Solusi (Pusat Sasaran)		6,32	3,21	1,50	9,00	28,03						
2	1505	Peningkatan Fasilitas dan Sarana Prasarana (Pusat Sasaran) Matra Laut (Pusat Sasaran)		76,39	55,55	70,00	40,00	302,93					
3	1506	Peningkatan Fasilitas Operasional Matra Laut (Pusat Sasaran)		55,00	57,75	75,00	86,25	274,00					

NO KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI										JUMLAH	KET
		RENCANA				PRAKIRAN MAJU							
		2010	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014		
1	2	4	3	6	7	8	9	10					
4.	1507		176,08	195,27	230,00	290,00						91,95	
5	1509		1,30	2,00	3,00	3,50						10,00	
25	Penyenggaraan manajemen dan operasional Matra Laut	4.886,08	5.828,62	6.715,30	7.633,67	8.808,12	33.871,74						
1.	1509		8,50	8,50	10,78	12,40	40,18						
2.	1510		304,67	341,23	472,00	1.043,75	2.161,65						
3.	1511		12,92	13,00	15,00	17,25	58,17						
4.	1512		-	2,20	3,54	4,51	10,25						
5.	1513		22,75	22,75	27,50	31,63	104,13						
6.	1514		541,33	672,46	767,00	893,05	2.873,84						
7.	1515		7,25	9,25	11,00	14,40	41,90						
8.	1516		4.857,37	5.564,45	6.201,74	6.616,14	23.270,00						
9.	1517		6,00	7,50	7,50	8,63	29,63						
10.	1518		4,82	4,82	6,50	7,18	23,62						
11.	1519		63,51	69,14	111,11	128,58	372,34						

NO KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI										JUNJAH	KET	
		RENCANA			PRAKIRAAN MAJU									
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E.	TNI AU		8.015,95	8.632,58	8.010,71	13.987,83	15.948,71	51.595,88						
26	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara		2.713,14	3.239,83	3.710,05	3.904,61	3.952,90	17.530,53						
1	1541 Penyelenggaraan Keptisika Militer Utama		2,10	2,10	3,39	2,99	3,15	11,63						
2	1542 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan		2,00	2,00	2,25	2,55	2,80	9,70						
3	1543 Har/Perawatan peralatan Fungsional, Fis & Sprins serta LTGA		102,07	115,75	115,75	127,49	130,09	475,49						
4	1544 Penyelenggaraan Belayanan Kesehatan		15,20	17,97	17,97	22,49	21,25	79,09						
5	1545 Penyelenggaraan Adm Perencanaan, Penganggaran & Keuangan		38,15	41,96	41,96	41,19	43,36	164,66						
6	1546 Penyelenggaraan Kelembagaan, Har & Har		1,35	1,93	1,93	1,72	1,77	7,77						
7	1547 Penyelenggaraan Adm Kal Umum & Har		304,43	521,66	521,66	553,38	581,04	2.160,51						
8	1548 Penyelenggaraan Administrasi Personel		1,25	1,25	1,15	1,45	1,50	5,65						
9	1549 Penyelenggaraan Pemans dan Perum Matra Udara		2,90	3,85	3,85	5,67	7,25	20,67						
10	1550 Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Udara		2.360,26	2.368,50	2.368,50	3.131,29	3.154,90	11.834,95						
11	1551 Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Udara		10,03	10,03	11,34	13,29	13,70	48,45						
20	Dukungan Kesiapan Matra Udara		354,31	426,32	559,40	742,01	841,96	2.954,00						
1	1520 Penyelenggaraan OMSP Matra Udara		1,50	1,50	1,50	2,05	2,10	7,15						
2	1521 Perawatan/Perawatan Peralat Udara, Senjata & Almatius lainnya		269,61	269,92	269,92	431,36	523,63	1.515,62						

NO	NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI								Jumlah	KET
			RENCANA		PRAKIRAAN MAJU							
			2010	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3.	1522	Penyelenggaraan Dukungan Operasi Peningkatan		15,55	49,04	30,52	32,05	177,16				
4.	1523	Peningkatan Sistem dan Evaluasi Kinerja Mitra Utara		10,49	14,26	13,99	14,69	53,43				
5.	1524	Peningkatan Perawatan Road, TSS & Alutisita Komplek Larung		99,65	101,13	207,60	211,76	620,14				
6.	1525	Penyelenggaraan Uji Pelekan Material dan Pasir-as Mitra Utara		9,50	10,31	13,03	13,57	46,41				
7.	1526	Libangan Mitra Utara		7,97	25,00	25,00	25,00	82,97				
8.	1527	Penyelenggaraan Interjen dan Perizinan Mitra Utara		5,13	6,00	7,33	7,48	25,94		PP 1/V		
9.	1528	Penyelenggaraan Perberdayaan Wilayah Kecamatan Mitra Utara		1,70	2,51	2,27	2,39	8,86				
10.	1529	Penyelenggaraan Survei		5,22	8,73	8,86	9,70	32,51		PP 4/1		
21		Modernisasi Alutisita/Non Alutisita, Peningkatan Fasilitas dan Sarpras Mitra Utara	1.717,58	4.705,20	3.460,45	9.062,40	10.852,03	29.797,66		181		
1.	1530	Pengadaan Alutisita Strategic Mitra Utara (PILAK/KE)		2.415,75	1.760,00	4.500,00	4.750,00	13.425,75		PP 2/1		
		a. Rupaiah Murni Pencampung (Uang Muka KE)		288,37	-	-	-	288,37				
		b. PUN		1.631,13	-	-	-	1.631,13				
		5. Percepatan MEF 3 Restra		493,25	1.760,00	4.500,00	4.750,00	11.503,25				
2.	1531	Peningkatan/pengadaan Pesawat udara dan dukungan lainnya		1.516,19	950,00	2.945,25	3.715,95	9.137,39		PP 2/1		
3.	1532	Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Mitra Utara		112,35	106,22	253,34	779,27	1.251,18				

NO KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI										Jumlah	KET
		RENCANA					PRAKIRAAN MAJU						
		2010 4	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2013 7	2014 8	2013 7	2014 8	2013 7		
1	2	3										9	10
4.	1533	Peningkatan/perogatan Redar, PSU, dan Alat Kontek Lainnya		528,26	800,00	1.076,44	1.260,91					3.374,61	PP 2/1
5.	1534	Penyusunan/pengadaan Saran/Sevita		79,66	80,00	130,31	191,18					510,15	
6.	1535	Perubahan peralihan Non Alutsista		32,99	34,23	128,06	145,72					381,00	
22	Peningkatan Profesionalisme Personel Mitra Udara	200,92	261,33	280,81	278,81	291,82	1.313,69						
1.	1536	Latihan Mitra Udara		40,24	49,42	59,31	50,85					159,82	
2.	1537	Penyelenggaraan Pendidikan Mitra Udara		136,79	141,40	149,10	136,59					582,91	
3.	1538	Pembangunan Sarpras Kesejahteraan Personel Mitra Udara		72,47	81,78	71,98	75,58					301,81	
4.	1539	Worship		5,48	5,70	6,04	6,34					23,62	
5.	1540	Recyclemegearan Disikologi Mitra Udara		1,35	2,15	2,35	2,45					8,61	
TOTAL			52.352,25	58.021,79	72.538,51	96.439,23	108.755,37	388.107,15					

Catatan :

- Program dan kegiatan Tahun 2010 menggunakan S.W Tahun 2008, sedangkan program dan kegiatan pada kolom tiga adalah sesuai dengan SPA Tahun 2010. Oleh karena itu pada kolom empat hanya dicantumkan besaran anggaran dari program saja, sedangkan besaran anggaran kegiatan dapat dilihat pada pasal 27 bukuiah Kemristri.
- Program dan Kegiatan pada sublampiran ini mengacu pada Peraturan Penyusunan Kerja K/L TA 201 yang diterbitkan oleh Kemen PPN/Ko Repprenas, namun hanya yang memperoleh alokasi anggaran.
- PR 1 - Prioritas Bidang (Peningkatan kemampuan pertahanan menuju MUR
 PP 1/1 - Fokus Prioritas 1 Meningkatkan profesionalisme personel
 PP 2/1 - Fokus Prioritas 2 Modernisasi Alutsista/non Alutsista
 Mengembangkan dan memanfaatkan kekuatan Maritim darat, laut dan udara
 PP 3/1 - Fokus prioritas 3 Percepatan Pembangunan Komponen Bela Negara
 PP 4/1 - Fokus prioritas 4 Peningkatan penggunaan wilayah pertahanan dan pulau terdepan (terluar)

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIC INDONESIA,

PURNOMO YUSDIANTORO

REPUBLIC OF INDONESIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DEPARTMENT OF DEFENSE
 KEMENTERIAN PERTAHANAN
 NO. 26 TAHUN 2012
 TENTANG STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

SHOPPING LIST ALUTSISTA PERCEPATAN PEMENUHAN MRF
 SEBESAR Rp 4,00 T (APBN Rp 2,00 T DAN APBN-P Rp 2,00 T) TA. 2011

NO	KEGIATAN	VOLUME	HARGA		JUMLAH
			SATUAN	(dalam rupiah)	
1		3	4	5	
I. APBN					2.000.000.000.000
A. MABES TNI					200.000.000.000
1. SENJATA					15.647.000.000
a.	SMU Kal 7,62 mm GPMG Mag 55	20	Pak	111.000.000	2.220.000.000
b.	SMB Kal 12,7 QCB	10	Pak	286.700.000	2.867.000.000
c.	Senapan HK 415 Kal 4,56	120	Pak	83.500.000	9.990.000.000
2. MKB					20.417.520.000
a.	Musket 20 mm x 110 Gerdikon	1300	Br	4.000.000	5.200.000.000
b.	Musket 90 mm Semplok	770	Br	8.811.000	6.781.170.000
c.	ML AGI Kal 40 mm	7525	Br	771.000	5.433.030.000
d.	Musket 9 mm Frangible Lead Free Primetack UK	200000	Br	15.000	2.000.000.000
3. ALPALSUS					150.856.289.000
a.	Mesin Angkatan Air 2000 lt/jam	18	Unit	325.000.000	5.850.000.000
b.	Alat Dikom Berjari Laser Grip	600	Unit	7.080.000	4.248.000.000
c.	Sos Radar 9 M	4	Unit	1.485.000.000	5.940.000.000
d.	Res Hunter 12 M	4	Unit	1.485.000.000	5.940.000.000
e.	Peralat Karat dan Motor Tempel	24	Unit	1.000.000	3.360.000.000
f.	Generator 30 KVA	15	Unit	255.000.000	3.825.000.000
g.	Warning System Sesko TNI	-	Paket	1.913.289.000	1.913.289.000
h.	Virtual Area Solution (VAS)	2	Paket	2.980.000.000	5.960.000.000
i.	Alnea Tactical Navigation Positioning (ATNP)	-	Paket	24.950.000.000	24.950.000.000
j.	Digital	-	Paket	19.870.000.000	19.870.000.000
k.	Colour Under Vehicle Surveillance System (CUVSS)	-	Paket	10.000.000.000	10.000.000.000
l.	Sub Skema:	-	Paket	15.000.000.000	15.000.000.000

1	2	3	4	5
4.	ALKOM Alkom VVIP Puspasampres	1 Paket	1.960.603.000	1.960.603.000 1.960.603.000
5.	ALAT DETEKSI a. GPS MAP 296 b. Full Body Scanner Thruvision	61 Buah 2 Paket	38.000.000 2.421.091.000	7.566.088.000 2.318.000.000 5.248.088.000
6.	ALOPTIK a. Kompas	1.015 Buah	3.520.000	3.552.500.000 3.552.500.000
B.	TNI AD			600.000.000.000
1.	JATRI/JATPOK			224.600.000.000
	a. Senapan SS2 V4 (2 Yonif Raider)	1.380 Pucuk	33.000.000	42.240.000.000
	b. Pistol P2/G2 Combat	120 Pucuk	5.500.000	660.000.000
	c. SS2 V5 (2 Yonif Lembang)	1.268 Pucuk	25.000.000	31.700.000.000
	d. AUGM (3 Yonif di Perbarasan)	3 Paket	50.000.000.000	150.000.000.000
2.	MUNISI			49.690.000.000
	a. Kal 5,56 MM S TU	10.846.179 Butir	3.900	41.215.480.000
	b. Kal 9 MM Mbr-1 TU	3.081.644 Butir	2.750	8.474.520.000
3.	MER 105 MM 3 RAI (3 YON)	18 Pucuk	10.825.000.000	189.450.000.000
4.	PUO			46.480.000.000
	a. PUO Statik	714 Unit	50.000.000	35.700.000.000
	b. PUO (Bare Ball + Kap	90 Unit	154.000.000	10.780.000.000
5.	RAWTIS			80.280.000.000
	a. Truck 2,5 ton	79 Unit	720.000.000	56.880.000.000
	b. Ramrik Meriam 105	18 Unit	1.300.000.000	23.400.000.000

1	2	3	4	5
6.	ALKAPSUS KI TAIPIR KOSTRAD			9.500.000.000
C. TNI AL				600.000.000.000
1.	Unit Control System (UCS) - Kudu C-703 untuk 2 Unit NCS	1 Paket	9.500.000.000	9.500.000.000
2.	Pelatihan Kapal Fatahillah	1 Paket	212.000.000.000	600.000.000.000
3.	Operaker (Pengontrol Kapal)	2 Unit	1.000.000.000	4.000.000.000
4.	Munisi Kaliber Kecil	3 Unit	9.500.000.000	19.000.000.000
		1 Paket	6.000.000.000	6.000.000.000
D. TNI AD				600.000.000.000
1.	Pesawat B-707-400 Plus PT Garuda 2 Unit	1 Paket	185.000.000.000	185.000.000.000
2.	Suad C-130	1 Paket	185.000.000.000	185.000.000.000
3.	Suad 2 Pesawat M-263	1 Paket	141.600.000.000	141.600.000.000
4.	Suad Pesawat P-5	1 Paket	34.400.000.000	34.400.000.000
5.	Suad C-130-233	1 Paket	50.000.000.000	50.000.000.000
II. APDN P				2.000.000.000.000
A. KEMHAN				98.700.000.000
	Untuk Pembayaran Tanah			98.700.000.000
	Yudikes Malangk	1 Paket	98.700.000.000	98.700.000.000
B. MABES TNI				88.520.575.695
	BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) DN			
1.	Alpulus			57.290.417.000
a.	ROV (Remotely Operated Vehicle)	1 Paket	10.540.417.000	10.540.417.000
b.	NSS-75 (Naval Subsurface Firing System)	1 Paket	24.950.000.000	24.950.000.000
c.	CUVSS (Coast Guard Laser Vehicle Surveillance System)	1 Paket	10.000.000.000	10.000.000.000
d.	Termin Anti Peluru	700 Paket	4.000.000	2.800.000.000
f.	Gerseel 450 RVA	1 Paket	5.000.000.000	5.000.000.000

1	2	3	4	5	6
2.	Sarpras Pamtes/Pulau Terfuer				19.633.260.000
	a. Alat Pemukul Air Kap 2000 ltr/jar:	17 Unit	323.300.000		5.409.500.000
	b. Sea Rider	3 Unit	2.000.000.000		10.000.000.000
	c. Censet 30 EWA	10 Unit	235.000.000		2.350.000.000
	d. Supada Motor	70 Unit	15.000.000		1.050.000.000
	e. Solar Gelitan Kapaga	1 Paket	533.760.000		533.760.000
3.	Alkom				3.525.000.000
	a. GTA 50 Waz DIF	3 Unit	598.000.000		1.794.000.000
	b. GTA 50 Waz VHP	3 Unit	577.000.000		1.731.000.000
4.	Sarpras Virtual Arm Solution				8.071.898.695
	a. Kabinan d. Jember	1 Unit	1.410.927.000		1.410.927.000
	b. Kodan IX/Sulabaya	1 Unit	1.412.772.000		1.412.772.000
	c. Kodan XVII/Cendrawasih	1 Unit	2.263.960.000		2.263.960.000
	d. Kodan VI/Mulawarman	1 Unit	1.678.123.695		1.678.123.695
	e. Pasmar I/Surabaya	1 Unit	1.248.123.000		1.248.123.000
C.	TNI AD				622.663.934.305
1.	Pesawat Terbang				293.472.963.000
	a. Helikopter Bell-412	2 Unit	194.000.000.000		388.000.000.000
	b. Helikopter Bell-412 D11	1 Paket	63.480.000.000		63.480.000.000
	c. Perbaikan dan Susad Helikopter - Pengadaan Susad Helikopter - Pengadaan Susad Helikopter	1 Paket 1 Paket	19.719.148.000 3.533.815.000		19.719.148.000 3.533.815.000
2.	Senjata dan Munisi				210.234.773.785
	a. Jatril/Jatpuk				85.434.738.230
	1) Senjata Berkaliber 19 mm (S0-1)	140 Pakuk	80.000.000		11.200.000.000
	2) Terbang Bekal untuk S82 V4	2.385 Buah	14.800.000		35.258.000.000
	3) Alkapsus Tactical Pictunty Rail (taks amjaza S82 V4)	500 Buah	4.700.000		2.350.000.000
	4) SPR	150 Paket	20.000.000		3.000.000.000
	5) Senjata SO Minimi Kal 5,56 mm & Perleengkapannya	104 Paket	90.436.745		17.641.738.230

1	2	3	4	5
b. Munisi				124.800.035.555
1)	Munisi Kaliber Kecil BAKIG - Mu. Kal. 5,56 mm (Mu 5M A) Sompok - Mu. Kal. 5,56 mm (Mu-5 H) - Mu. Kal. 5,56 mm (Mu 5M AZI Chamber) - Mu. Kal. 5,56 mm (Mu-5 T) - Mokal 7,62 mm SPR - M.u. Kal. 12,7 mm Sniper Anti Material	1.000.000 Butir 6.289.832 Butir 600.000 Butir 13.982.332 Butir 25.000 Butir 4.000 Butir	3.368 2.226 3.368 3.565 25.500 475.000	71.774.477.555 3.368.000.000 14.001.165.440 2.020.800.000 49.847.012.115 637.500.000 1.900.000.000
2)	Munisi Kaliber Besar (MKB) - Mokal 75 mm Saluting Gun - Mu SPG 1 A kal. 40 mm - 3LT KC-90 - Mokal 90 mm Sompok	5.480 Butir 10.600 Butir 1.000 Butir 557 Butir	3.093.000 722.500 28.000.000 15.000.000	52.546.280.000 16.887.780.000 7.658.500.000 28.000.000.000 8.535.000.000 479.278.000
3)	Munisi Khusus - Gr. Typ 5 Pst. A3 Pindac - Gr. Typ Offensif	1.000 Butir 1.000 Butir	265.700 212.548	265.700.000 212.548.000
3.	Rantis			69.229.930.000
1)	Trak 2,5 Ton (4x4)	25 Unit	600.000.000	15.000.000.000
2)	Rematik Meriam 105 5 Ton (6x6)	18 Unit	1.300.000.000	23.400.000.000
3)	Jeep 3/4 Ton (4x4)	55 Unit	375.000.000	20.625.000.000
4)	Dump truck 5 T	2 Unit	724.526.000	1.449.052.000
5)	Trailer Lowbed 20 T	1 Unit	475.878.000	475.878.000
6)	Kendaraan Munisi 5 Ton (6x6)	9 Unit	920.000.000	8.280.000.000
4.	Alat Optik			2.975.000.000
1)	Aldik Mortir 60 mm Tampella	35 Unit	40.000.000	1.400.000.000
2)	Aldik Mortir 81 mm SB	35 Unit	45.000.000	1.575.000.000
5.	Alberzi - Jembatan Taktis MGB (30m)/Double Storey + Link Ent	1 Unit	35.751.267.520	36.751.267.520 36.751.267.520

1	2	3	4	5
6.	Tambahan Dari Mabes TNI			10.000.000.000
	- Laborsortiran: Velokas: Dibahagi	1 Paket	10.000.000.000	10.000.000.000
D.	TNI AL			696.863.490.000
1.	Kapal			438.500.000.000
	a. Pengadaan Kapal Patroli 60 M	3 Unit	80.000.000.000	144.000.000.000
	b. Pengadaan Landing Craft Utility (LCU)	4 Unit	26.500.000.000	106.000.000.000
	c. Pengadaan Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP)	8 Unit	3.000.000.000	40.000.000.000
	d. Pengadaan Kapal Puncak	2 Unit	40.000.000.000	48.000.000.000
	e. Pengadaan Speed XRI	1 paket	33.000.000.000	33.000.000.000
	f. Pengadaan Kapal Baris Cair Minyak	1 Unit	225.000.000.000	67.500.000.000
2.	Pesawat			201.000.000.000
	a. Pengadaan Helikopter Bell 412	1 Unit	110.000.000.000	110.000.000.000
	b. Pengadaan Helikopter Bell-412 Tahap II	2 Unit	110.000.000.000	66.000.000.000
	c. Pengadaan Speed Peled	1 paket	25.000.000.000	25.000.000.000
3.	Senjata, Munisi dan Kendaraan			57.363.490.000
	a. Pengadaan Senjata Vektor GA-1 kal 20 mm	8 Pucuk	1.890.000.000	15.120.000.000
	b. Pengadaan Pistol Sig Sauer	540 Pucuk	13.900.000	7.506.000.000
	c. Pengadaan Muzel 20 mm Vektor GA-1	11.000 Butir	983.000	10.842.490.000
	d. Pengadaan Bahan 3/4 Ton	25 Unit	375.000.000	9.375.000.000
	e. Pengadaan Truk 2 1/2 Ton	15 Unit	600.000.000	9.000.000.000
	f. Pengadaan Kendaraan Munisi 3 Ton (6x6)	6 Unit	920.000.000	5.520.000.000
E.	TNI AU			493.252.000.000
1.	Ikibah/PDM dari Australia			462.500.000.000
	- PDM C-130H ikibah RAAF dan Dukaya	4 Unit	115.625.000.000	162.500.000.000

1	2	3	4	5
2.	Pemeliharaan Pesawat			8.320.000.000
	Perbaikan Pesawat A320X3			6.131.000.000
	a. Overhaul Modul F 3 PW.M13401	1 Ea	3.250.000.000	3.250.000.000
	b. Overhaul Modul F 7 PW.M17401	1 Ea	4.350.000.000	4.350.000.000
	c. Daun Asesorulator Hydraulic PN AIR872036 b	3 Pa	230.000.000	690.000.000
	d. Daun Extender Strip PN M16.3051-480	4 Ea	7.500.000	30.000.000
3.	Kendaraan dan Munisi			22.452.000.000
	a. Daun Kendaraan Munisi 5 Tim 10x61	5 Tim	9.200.000.000	9.200.000.000
	b. Daun Bomb P 207P	477 Unit	17.900.000	8.199.300.000
	c. Daun Bomb OP92-100	200 Unit	14.015.000	8.604.300.000
	JUMLAH			4.000.000.000.000

Catatan :

- Hewanakad hasil Raker Wawancara dengan Komisi DPRD Mabar tanggal 14 Oktober 2011.
- Pemeliharaan pesawat MEF ditransfer ke perusahaan sebesar Rp 31,90 T
- Revisi surat melapor AFTH sebesar Rp 2,00 T dan AFBN F sebesar Rp 2,10 T

**MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,
PURNOMO YUSDIANTORO**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	2012 Tahun													
	1. Pokok Rekening													
	2. Sub Rekening													
	3. Deskripsi													
	4. Kode													
	5. Rencana													
	6. Realisasi													
	7. Saldo													
	8. Keterangan													
	9. Lokasi													
	10. Tanggal													
	11. Nama													
	12. No													
	13. Tanggal													
	14. Nama													
	15. No													
	16. Tanggal													
	17. Nama													
	18. No													
	19. Tanggal													
	20. Nama													
	21. No													
	22. Tanggal													
	23. Nama													
	24. No													
	25. Tanggal													
	26. Nama													
	27. No													
	28. Tanggal													
	29. Nama													
	30. No													
	31. Tanggal													
	32. Nama													
	33. No													
	34. Tanggal													
	35. Nama													
	36. No													
	37. Tanggal													
	38. Nama													
	39. No													
	40. Tanggal													
	41. Nama													
	42. No													
	43. Tanggal													
	44. Nama													
	45. No													
	46. Tanggal													
	47. Nama													
	48. No													
	49. Tanggal													
	50. Nama													
	51. No													
	52. Tanggal													
	53. Nama													
	54. No													
	55. Tanggal													
	56. Nama													
	57. No													
	58. Tanggal													
	59. Nama													
	60. No													
	61. Tanggal													
	62. Nama													
	63. No													
	64. Tanggal													
	65. Nama													
	66. No													
	67. Tanggal													
	68. Nama													
	69. No													
	70. Tanggal													
	71. Nama													
	72. No													
	73. Tanggal													
	74. Nama													
	75. No													
	76. Tanggal													
	77. Nama													
	78. No													
	79. Tanggal													
	80. Nama													
	81. No													
	82. Tanggal													
	83. Nama													
	84. No													
	85. Tanggal													
	86. Nama													
	87. No													
	88. Tanggal													
	89. Nama													
	90. No													
	91. Tanggal													
	92. Nama													
	93. No													
	94. Tanggal													
	95. Nama													
	96. No													
	97. Tanggal													
	98. Nama													
	99. No													
	100. Tanggal													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
K	KODAM VII/MBR															
													1	130.000	47	3.104.100.100
													2	1.100.000	92	5.170.000
													3	1.100.000	92	5.170.000
													4	1.100.000	92	5.170.000
													5	1.100.000	92	5.170.000
													6	1.100.000	92	5.170.000
													7	1.100.000	92	5.170.000
													8	1.100.000	92	5.170.000
													9	1.100.000	92	5.170.000
													10	1.100.000	92	5.170.000
													11	1.100.000	92	5.170.000
													12	1.100.000	92	5.170.000
													13	1.100.000	92	5.170.000
													L	KODAM VII/MBR	KODAM VII/MBR	KODAM VII/MBR
1	1.100.000	92	5.170.000													
2	1.100.000	92	5.170.000													
3	1.100.000	92	5.170.000													
4	1.100.000	92	5.170.000													
5	1.100.000	92	5.170.000													
6	1.100.000	92	5.170.000													
7	1.100.000	92	5.170.000													
8	1.100.000	92	5.170.000													
9	1.100.000	92	5.170.000													
10	1.100.000	92	5.170.000													
11	1.100.000	92	5.170.000													
12	1.100.000	92	5.170.000													
13	1.100.000	92	5.170.000													

1	2	3	4	5	6	7
2	MIK	40	290.100	296.376.950		390.750.450
a.	Musai 20 mm (Mu 20)	401		11.900.000	300.000	121.000.000
b.	Musai 25 mm (Mu 25)	912		11.900.000	22.500	137.700.000
c.	Musai 30 mm (Mu 30)	600		11.900.000	11.900	12.12.000
d.	Musai 22 mm (Mu 22)	370	21.000	11.700.000	24.000	131.600.000
e.	Musai 30 mm (Mu 30) (HCL) (H-2)	660	17.000	11.300.000	12.000	140.700.000
f.	Musai 40 mm (Mu 40) (Rampung) (R-2)	570			13.000	24.000.000
g.	Musai 40 mm (Mu 40) (Rampung) (R-2)	1.110		14.130.000	12.000	16.036.000
h.	Musai 30 mm (Mu 30) (R-2)	1.415	3.000	15.030.000	16.000	17.140.000
i.	Musai 40 mm (Mu 40) (R-2)	602	25.000	16.030.000	44.000	20.198.000
j.	Musai 40 mm (Mu 40) (R-2)	1.415	20.000	12.040.000	25.000	14.080.000
k.	Musai 40 mm (Mu 40) (R-2)	602	17.000	10.230.000	17.000	12.000.000
l.	Musai 37 mm (Mu 37)	2.000	2.000	14.157.000	7.500	19.395.000
m.	Enter Flare (E)	121.254	2.000	11.057.700	50	11.057.700
n.	5/8 MD 60 mm (M 60)	3.600	30		5.000	11.000.000
o.	M 60	3.600			4.000	13.986.000
p.	Musai 75 mm (Mu 75) (Rampung)	6.015	1.750	10.570.250	1.750	10.720.250
q.	Musai 75 mm (Mu 75) (Rampung)	2.808	3.000	15.994.000	7.000	19.036.000
r.	Musai 90 mm (Mu 90)	8.811	1.000	13.110.000	1.500	14.2.000
s.	Musai 105 mm (Mu 105)	3.151	500	13.510.000	800	13.575.500
t.	Musai 105 mm (Mu 105)	7.889	1.500	11.830.000	2.000	15.778.000
u.	Benda 15,100	5.903	500	10.780.000	500	10.780.000
v.	T 80 817	6.500.000	4	25.000.000	1	30.000.000
w.	T 80 817	12.500.000	4	60.000.000	4	80.000.000
				119.510.500		119.825.000
3	DIK dan MUSUS			4.300.000	4.000.000	4.000.000
a.	Musai 9 mm (Mu 9)	3	1.000.000			
b.	Musai 9 mm (Mu 9)	3	1.000.000	~500.000	1.500.000	4.000.000
c.	Musai 40 mm	5	1.000.000	7.500.000	1.500.000	7.500.000
d.	Musai 5,50 mm (Mu 5,5)	3	2.500.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000
e.	Musai 5,50 mm (Mu 5,5)	3	1.000.000	6.000.000	2.000.000	6.000.000

1	2	3	4	5	6	7	
	m. Alas Beton terditi dari :	7.500.000	Peker	1	7.500.000	4	30.000.000
	1. Pondasi	622.270					6.330.000
	2. Dinding Beton 1,00 m x 4	500.000					13.250.000
	3. Dinding beton 1,00 m x 2,1	211.940					5.400.000
	4. Dinding beton 1,00 m x 3,0	311.960					627.000
	5. Dinding Beton 1,00 m x 2,1	337.960					1.400.000
	6. Dinding beton 1,00 m x 3,0	129.000					136.000
	7. Dinding beton 1,00 m x 3,0	90.000					1.870.000
	8. Dinding beton 1,00 m x 3,0	30.000					30.000
	9. Dinding beton 1,00 m x 3,0	80.000					200.000
	10. Dinding beton 1,00 m x 3,0	100.000					6.000.000
	11. Dinding beton 1,00 m x 3,0	200.000					900.000
	12. Dinding beton 1,00 m x 3,0	2.000.000					11.750.000
	5 ALKAPSIH	310.480.500			117.750.000		
	1. 120x120x120	77.000	Peker	40	2.275.000	10	22.000.000
	2. 300x300x120	50.000	Peker	10	16.000.000	10	8.075.000
	3. 300x300x150	100.000	Peker	10	16.000.000	2	8.750.000
	4. 300x300x200	50.000	Peker	10	22.220.000	2	10.200.000
	5. 300x300x250	100.000	Peker	10	15.000.000	2	10.000.000
	6. 300x300x300	100.000	Peker	2.000	20.000.000	3.000	90.000.000
	6 ALKDM	84.196.062			150.772.062		
	1. 120x120x120	7.000.000	Peker	1	7.000.000	2	1.000.000
	2. 150x150x150	9.000.000	Peker	1	9.000.000	3	27.000.000
	3. 180x180x180	4.250.000	Peker	70	21.375.000	9	24.300.000
	4. 210x210x180	1.000.000	Peker	64	6.400.000	11	7.330.000
	5. 240x240x180	1.000.000	Peker	1	10.000.000	3	14.000.000
	6. 270x270x180	3.000.000	Peker	1	3.000.000	4	10.000.000
	7. 300x300x180	5.000.000	Peker	1	5.000.000	2	10.000.000
	8. 330x330x180	5.000.000	Peker	1	5.000.000	2	10.000.000
	9. 360x360x180	5.000.000	Peker	1	5.000.000	2	10.000.000
	10. 390x390x180	5.000.000	Peker	1	5.000.000	2	10.000.000

1	2	3	4	5	6	7
7	Akt Deleted			93.343.463		100.215.595
	a. Security Over-Work/Overload/Excess Eff	40.000 Paket	200	11.317.750	200	11.317.750
	b. Bar Code - Software	3.000.000 Paket	2	6.200.000	2	6.200.000
	c. Bar Code Blanket	600.000 Paket	25	15.125.000	25	15.125.000
	d. Barcode dan label untuk barang	1.000.000 Paket	10	1.000.000	10	1.000.000
	e. Grafer dan alat display - Retail (p. dan 2)	1.375.000 Paket	13	16.500.000	13	16.500.000
	f. Handheld Bar/Handheld Supermarket	2.000.000 Paket	5	16.000.000	5	16.000.000
	g. NCR - Retail (p. dan 1) Supermarket	1.200.000 Paket	65	10.500.000	65	10.500.000
	h. Full Body Scanner Handheld	2.624.044 Paket	1	3.248.088	1	3.248.088
8	ADOPTIF			53.632.850		121.462.850
	a. Kumpas	2.300 Bunt	2.300	5.000.000	2.300	5.000.000
	b. GPS-Mat 200	38.000 Bunt	100	3.600.000	100	3.600.000
	c. MAT FSC-1	70.000 Bunt	142	10.440.000	142	10.440.000
	d. Terminal TV 50 RC	13.000 Bunt	190	9.800.000	190	9.800.000
	e. Antena 800M	1.000.000 Bunt	45	10.000.000	45	10.000.000
	f. X141 Digital	205.714 Bunt	33	7.142.850	33	7.142.850
	g. Terminal Inverter	285.000 Bunt	10	7.100.000	10	7.100.000
	h. Terminal USB	35.000 Bunt	100	7.000.000	100	7.000.000
	i. Antena for Police & Taxi Hand. Ltd	25.000.000 Bunt	2	50.000.000	2	50.000.000
9	KAMOR			49.813.292		43.878.812
	a. Bar Scanner Set - Peace Security	40.813.292 Paket	1	40.813.292	-	-
	b. Bar Scanner Set - Peace Security	40.878.812 Paket	-	-	1	43.878.812
10	KANTOR/RUMDIS/SAIRPLAS			35.034.763		83.072.111
	a. Perch. Kertas tipe 47 dual tipe T1	44.500.000 Paket	-	-	1	12.500.000
	b. Bermana Kertas M1	15.799.263 Paket	1	15.799.263	-	-
	c. Perch. Kertas tipe 30	30.500.000 Paket	-	-	1	31.500.000
	d. Perch. Kertas, Jingga, Perampas	20.233.000 Paket	1	20.233.000	-	-
	e. Perch. Kertas, Jingga, 2000 dan other	28.072.111 Paket	-	-	1	28.072.111

1	2	3	4	5	6	7
B. PNJAD				3.000.000,000		3.250.000,000
1	Kantor Pusat			1.000.000,000		1.000.000,000
2	Kantor Wilayah			1.000.000,000		1.000.000,000
3	Kantor Kabupaten			1.000.000,000		1.000.000,000
4	Kantor Kecamatan			1.000.000,000		1.000.000,000
5	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
6	Kantor Balai Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
7	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
8	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
9	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
10	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
11	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
12	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
13	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
14	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
15	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
16	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
17	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
18	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
19	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
20	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
21	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
22	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
23	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
24	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
25	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
26	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
27	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
28	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
29	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
30	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
31	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
32	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
33	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
34	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000
35	Kantor Desa			1.000.000,000		1.000.000,000

1	2	3	4	5	6	7
1	Kelembagaan	97.000.000,00	26	1.200.000,00		98.000.000,00
a	Kelembagaan	97.000.000,00	26	1.200.000,00		98.000.000,00
b	Kelembagaan	97.000.000,00	26	1.200.000,00		98.000.000,00
2	Manajemen dan Operasional	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
a	Manajemen dan Operasional	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
3	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
a	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
b	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
4	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
a	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
b	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
5	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
a	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
b	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
6	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
a	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
b	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
7	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
a	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
b	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
8	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
a	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
b	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
9	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
a	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00
b	Kelembagaan	97.000.000,00	15	1.200.000,00		98.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
B.	PENDIRING ALUTSISTA (HARGA SATUAN NAIK 10% TIAP TAHUN)			791.440.735		321.934.658
a.	NOSTRY					
	a. Yon Diponegoro 15/67			50.094.204		126.091.350
	b. Yon 221	5.250 M2	4.780	19.150.000	1.800	79.404.809
	21. Yon 222	5.250 M2	6.800	12.081.200	1.800	54.916.120
	20. Yon 223	5.250 M2	7.000	35.800.000	5.800	24.916.120
	b. B. G. di Gorontalo	4.200 M2	4.000	23.241.700	5.000	30.109.200
	c. Yon 200 - 105 submonev	4.300 M2	6.400	33.341.000	5.800	25.550.500
	d. Yon 200 - 106					50.107.200
c.	KODAM VII/DR					
	Yon 134/TS	3.110 M2	4.400	15.004.400	3.600	14.251.000
	Yon 134/TS			10.800.000		11.821.000
d.	KODAM VII/MLB					
	a. Yon 5/1 Malinau	3.850 M2	5.000	10.315.000		54.273.800
	b. N. Sulawesi 18. Eran	3.850 M2	4.500	21.175.000	2.900	8.165.700
	N. Sulawesi 18. Eran			19.057.500	4.200	5.526.700
e.	KODAM VII/WPB					
	N. Sulawesi - Di Makassar	5.800 M2	7.200	30.402.000	1.300	20.031.550
	N. Sulawesi - Di Makassar			30.402.000		30.031.550
f.	KODAM IX/LDI					
	B. G. di Gorontalo	3.110 M2	4.850	12.565.800	3.400	9.003.600
	B. G. di Gorontalo			12.565.800		4.902.000
g.	KODAM XII/HR					
	a. B. G. di Sulawesi	3.550 M2	1.300	23.058.000		20.170.500
	b. Yon 1042 Palasina	4.400 M2	3.000	18.875.000	4.100	20.102.500

1	2	3	4	5	6	7
7	KEDAM NALPTM					
a.	Yon 734 Sa. Bala	1.000 M2	2.700	12.098.000 12.098.000	7.000	11.541.000 14.521.000
8	Perumahan					
a.	D. 61/20 Th. Ke	4.400 M2		9.925.000		
b.	Perumahan					
1.	Perumahan No.46	4.600 M2	6.300	6.067.000		
2.	Perumahan No.47	4.870 M2	6.500	3.282.000		
3.	Perumahan No.48	4.800 M2	6.100	5.115.000		
9	KEDAM M					
a.	Yon 112 Bendalet	2.850 M2	3.310	69.490.000	1.000	76.720.000
b.	Yon 115 Bendalet	2.650 M2	3.000	9.053.900	1.000	75.134.500
c.	Yon 118 Bendalet	1.800 M2	6.100	13.611.100	3.000	13.074.500
d.	Yon 119 Bendalet	1.800 M2	6.100	25.623.800	4.000	20.363.200
e.	Yon 121 Bendalet	1.800 M2	4.700	19.924.500	3.100	18.008.200
f.	Yon 122 Bendalet	3.850 M2	4.400	20.123.000	4.200	20.051.500
10	TNT AL			4.000.000.000		4.250.000.000
1.	Perumahan Hei Mapo	186.000.000 Unit	6	1.116.000.000		
2.	Perumahan Gp. Jember (Perumahan Bank)	9.200.000 Unit	8	76.000.000		
3.	Perumahan Blok. IGR-01	27.000.000 Unit	2	130.000.000		
4.	Perumahan Swages. KR-43	21.230.000 Paket	1	212.700.000		
5.	Perumahan Swages. CR-12.000	411.000.000 Paket	1	212.500.000		
6.	Perumahan Kapi. A.000	100.000.000 Unit	1	320.000.000		
7.	Perumahan R 70 GRV 012 P. Mualaf	13.700.000 Unit	14	51.800.000		
8.	Perumahan Cember. Dax	5.000.000 Unit	10	30.000.000		
9.	Perumahan Esosok. 40 Blok. 3 75 K/Sigom	68.000.000 Dunit	7	476.000.000	4	272.000.000
10.	Perumahan Kapi. B.000 P. 40 M	75.000.000 Unit	2	20.000.000	2	150.000.000
11.	Yon 123 Bendalet	25.000.000 Dunit	4	91.000.000	4	93.000.000

1	2	3	4	5	6	7
D. TILAI				4.500.000.000		1.750.000.000
1.	Pengadaan Pso. Pengganti P-3 Tahap II	600.000.000	7	9.200.000.000	-	
2.	Pengadaan 3 Traktor Pengaspalan	4.000.000.000	-	500.000.000	-	
3.	Pengadaan 3 Pso. Pengganti P-5 Tahap I	600.000.000	4	-	-	1.000.000.000
4.	Ura. Lembar & Rencana Sapukan Pso. Pengganti P-5 Tahap II	700.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	Jumlah			13.000.000.000		14.000.000.000

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSDANTORO

76 2017

REALISASI DAN NEGERI/DAFTAR ALIHSTATUS ALIHSTATUS TUGAS
MELAKUKAN TERUS BERKONTINUITAS TUGAS 2010-2014

NO	NAMA	JABATAN	JENJANG	TANGGAL	KETERANGAN	PERANGKAT DAFTAR ALIHSTATUS		PERANGKAT NEGERI/DAFTAR ALIHSTATUS		KETERANGAN
						NO	TANGGAL	NO	TANGGAL	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

No.	Nama	Jenis	Kategori	Klasifikasi	Kode	Merk	Spesifikasi	Keterangan	Catatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

**MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

PURNOMO YUSDIANTORO

SUBKEMENTERIAN HUKUM
 DIREKTORAT PERENCANAAN DAN KENDALIAN
 BUDGET
 NOMOR 26 TAHUN 2012
 TENTANG PERENCANAAN DAN KENDALIAN BUDGET
 PERUSAHAAN NEGARA

REVISI RENCANA ANGGARAN PENGADAAN LAYANAN PERUSAHAAN
 NEGARA TAHUN 2014
 TABEL 2.10.2014

No	Uraian	Kode	NEV	Tahun												Total	Keterangan
				2012		2013		2014		2015		2016		2017			
1	2	3	4	JM	RP	JM	RP	JM	RP	JM	RP	JM	RP	JM	RP	5	6
TOTAL		196	97	9	377,00	2	3,87	25	79,33	31	99,69	30	93,64	653,53	49.000,00		
A. Des. T. dan		46	22	1	122,00									625,97	10.000,00		
B. Ang. dan							1,67		5,73					5,75	100,00		
1. KEMHUKUM			70	2	6,00	1	2,30	10	26,90	13	55,03	19	53,31	145,34	10.000,00		
Des. dan			15	1	6,00	1	2,30	10	21,13	12	41,23	17	45,31	139,79	10.000,00		
Ang. dan			55	1			1,67		5,73	1	13,80	2	8,00	5,55			
2. MARHA TNI			43	7	371,00			14	43,63	12	36,01	10	31,34	486,18			
Des. dan		196	43	7	371,00			14	43,63	12	36,01	10	31,34	486,18			
3. TRIAD				1										1,57			
Des. dan			1	1										1,57			
4. TRIAU				3				1	6,60	1	6,65	1	6,99	20,24			
Des. dan			3	3				1	6,60	1	6,65	1	6,99	20,24			
Ang. dan														1,57			
5. TOTAL														5,75			

MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 PURNOMO YUSDIANTORO

SUDJAMBARAN DAN LAMPUR
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 26
 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

**REALISASI DAN RENCANA KEBUTUHAN TUNJANGAN KHUSUS
 PERBATASAN DAN PULAU KECIL TERLUAR**

(dalam ribu rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI	DIPA				RENCANA KEBUTUHAN				JUMLAH
		2010	2011	2012	2013	2014	2013	2014		
1	2	4	6	7	8	9	10			
1.	MABES TNI	-	-	2.188,54	2.107,39	2.648,13	7.244,07			
2.	TNI AD	114.697,72	73.288,29	407.052,33	447.757,56	492.533,32	1.537.329,23			
3.	TNI AL	33.722,45	23.722,45	53.257,91	38.383,70	64.442,07	227.728,58			
4.	TNI AU	13.539,38	18.753,13	18.753,13	20.628,44	22.691,29	93.385,56			
	TOTAL	152.979,74	119.763,87	481.251,91	529.377,10	582.314,81	1.865.687,44			

Catatan:

1. Realisasi Tahun 2011 adalah sesuai dengan Semester I.
2. Besaran Tunjangan Kewaja pada Tahun 2012-2014 bersifat sementara menunggu perhitungan lebih lanjut.
3. Perhitungan Tahun 2013 dan 2014 adalah memuat 10%

**MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 PURNOMO YUSDIANTORO**

SUPLAIAN DAN DARI LAMPIRAN
 PERATURAN MENYERIK PERATAHAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 26 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

PENYALURAN APBN-P KEMHAN DAN TNI TAHUN 2010

(dalam miliar rupiah)

NO	URAIAN	VOLUME	JUMLAH
1	2	3	4
A.	KEMHAN		43,50
1.	Biayais Kemhan	1 Paket	1,00
2.	Penyelesaian Proyek MESS 1206 FY-07	1 Paket	19,00
3.	Pengamatan MKM dan penanggulangan tindak terorisme	1 Paket	2,00
4.	Peningkatan kemampuan pelatihan pertalanan keamanan	1 Paket	4,50
5.	Rehabilitasi bangunan Sekolah FK Rindam III Siliwangi	1 Paket	7,00
B.	MABES TNI		392,35
1.	Pengadaan Dynamic Positioning Manovering System (DPM-S)	1 Paket	39,20
2.	Pengadaan Tactical Team Trainer (TTT) A	1 Paket	24,50
3.	Pengadaan Tactical Team Trainer (TTT) B	1 Paket	24,50
4.	Chiller AC Central Basis TNI	1 Paket	15,00
5.	Studio Ground to Air	1 Paket	10,00
6.	Pengadaan Modul Tactical Team Trainer	1 Paket	23,00
7.	Virtual Acous Solution	1 Paket	74,94
8.	Sampul RS. TNI	1 Paket	22,50
9.	Sarlab	1 Paket	21,00
10.	Pengadaan Sujud Scorpien TNI AD	1 Paket	9,60
11.	Pengadaan Sujud Heli TNI AD	1 Paket	8,40
12.	Pengadaan Sujud Heli TNI AL	1 Paket	13,00
13.	Pengadaan Fair Pesawat	1 Paket	18,00

1	2	3	4
14	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Nilai	20.000
15	Kendaraan Bermotor (KBM) 1.000.000,00	20.000	20.000
16	Kendaraan Bermotor (KBM) 2.000.000,00	40.000	40.000
17	Kendaraan Bermotor (KBM) 3.000.000,00	60.000	60.000
18	Kendaraan Bermotor (KBM) 4.000.000,00	80.000	80.000
19	Kendaraan Bermotor (KBM) 5.000.000,00	100.000	100.000
20	Kendaraan Bermotor (KBM) 6.000.000,00	120.000	120.000
21	Kendaraan Bermotor (KBM) 7.000.000,00	140.000	140.000
22	Kendaraan Bermotor (KBM) 8.000.000,00	160.000	160.000
23	Kendaraan Bermotor (KBM) 9.000.000,00	180.000	180.000
24	Kendaraan Bermotor (KBM) 10.000.000,00	200.000	200.000
25	Kendaraan Bermotor (KBM) 11.000.000,00	220.000	220.000
26	Kendaraan Bermotor (KBM) 12.000.000,00	240.000	240.000
27	Kendaraan Bermotor (KBM) 13.000.000,00	260.000	260.000
28	Kendaraan Bermotor (KBM) 14.000.000,00	280.000	280.000
29	Kendaraan Bermotor (KBM) 15.000.000,00	300.000	300.000
30	Kendaraan Bermotor (KBM) 16.000.000,00	320.000	320.000
31	Kendaraan Bermotor (KBM) 17.000.000,00	340.000	340.000
32	Kendaraan Bermotor (KBM) 18.000.000,00	360.000	360.000
33	Kendaraan Bermotor (KBM) 19.000.000,00	380.000	380.000
34	Kendaraan Bermotor (KBM) 20.000.000,00	400.000	400.000
35	Kendaraan Bermotor (KBM) 21.000.000,00	420.000	420.000
36	Kendaraan Bermotor (KBM) 22.000.000,00	440.000	440.000
37	Kendaraan Bermotor (KBM) 23.000.000,00	460.000	460.000
38	Kendaraan Bermotor (KBM) 24.000.000,00	480.000	480.000
39	Kendaraan Bermotor (KBM) 25.000.000,00	500.000	500.000
40	Kendaraan Bermotor (KBM) 26.000.000,00	520.000	520.000
41	Kendaraan Bermotor (KBM) 27.000.000,00	540.000	540.000
42	Kendaraan Bermotor (KBM) 28.000.000,00	560.000	560.000
43	Kendaraan Bermotor (KBM) 29.000.000,00	580.000	580.000
44	Kendaraan Bermotor (KBM) 30.000.000,00	600.000	600.000
45	Kendaraan Bermotor (KBM) 31.000.000,00	620.000	620.000
46	Kendaraan Bermotor (KBM) 32.000.000,00	640.000	640.000
47	Kendaraan Bermotor (KBM) 33.000.000,00	660.000	660.000
48	Kendaraan Bermotor (KBM) 34.000.000,00	680.000	680.000
49	Kendaraan Bermotor (KBM) 35.000.000,00	700.000	700.000
50	Kendaraan Bermotor (KBM) 36.000.000,00	720.000	720.000
51	Kendaraan Bermotor (KBM) 37.000.000,00	740.000	740.000
52	Kendaraan Bermotor (KBM) 38.000.000,00	760.000	760.000
53	Kendaraan Bermotor (KBM) 39.000.000,00	780.000	780.000
54	Kendaraan Bermotor (KBM) 40.000.000,00	800.000	800.000
55	Kendaraan Bermotor (KBM) 41.000.000,00	820.000	820.000
56	Kendaraan Bermotor (KBM) 42.000.000,00	840.000	840.000
57	Kendaraan Bermotor (KBM) 43.000.000,00	860.000	860.000
58	Kendaraan Bermotor (KBM) 44.000.000,00	880.000	880.000
59	Kendaraan Bermotor (KBM) 45.000.000,00	900.000	900.000
60	Kendaraan Bermotor (KBM) 46.000.000,00	920.000	920.000
61	Kendaraan Bermotor (KBM) 47.000.000,00	940.000	940.000
62	Kendaraan Bermotor (KBM) 48.000.000,00	960.000	960.000
63	Kendaraan Bermotor (KBM) 49.000.000,00	980.000	980.000
64	Kendaraan Bermotor (KBM) 50.000.000,00	1.000.000	1.000.000
65	Kendaraan Bermotor (KBM) 51.000.000,00	1.020.000	1.020.000
66	Kendaraan Bermotor (KBM) 52.000.000,00	1.040.000	1.040.000
67	Kendaraan Bermotor (KBM) 53.000.000,00	1.060.000	1.060.000
68	Kendaraan Bermotor (KBM) 54.000.000,00	1.080.000	1.080.000
69	Kendaraan Bermotor (KBM) 55.000.000,00	1.100.000	1.100.000
70	Kendaraan Bermotor (KBM) 56.000.000,00	1.120.000	1.120.000
71	Kendaraan Bermotor (KBM) 57.000.000,00	1.140.000	1.140.000
72	Kendaraan Bermotor (KBM) 58.000.000,00	1.160.000	1.160.000
73	Kendaraan Bermotor (KBM) 59.000.000,00	1.180.000	1.180.000
74	Kendaraan Bermotor (KBM) 60.000.000,00	1.200.000	1.200.000
75	Kendaraan Bermotor (KBM) 61.000.000,00	1.220.000	1.220.000
76	Kendaraan Bermotor (KBM) 62.000.000,00	1.240.000	1.240.000
77	Kendaraan Bermotor (KBM) 63.000.000,00	1.260.000	1.260.000
78	Kendaraan Bermotor (KBM) 64.000.000,00	1.280.000	1.280.000
79	Kendaraan Bermotor (KBM) 65.000.000,00	1.300.000	1.300.000
80	Kendaraan Bermotor (KBM) 66.000.000,00	1.320.000	1.320.000
81	Kendaraan Bermotor (KBM) 67.000.000,00	1.340.000	1.340.000
82	Kendaraan Bermotor (KBM) 68.000.000,00	1.360.000	1.360.000
83	Kendaraan Bermotor (KBM) 69.000.000,00	1.380.000	1.380.000
84	Kendaraan Bermotor (KBM) 70.000.000,00	1.400.000	1.400.000
85	Kendaraan Bermotor (KBM) 71.000.000,00	1.420.000	1.420.000
86	Kendaraan Bermotor (KBM) 72.000.000,00	1.440.000	1.440.000
87	Kendaraan Bermotor (KBM) 73.000.000,00	1.460.000	1.460.000
88	Kendaraan Bermotor (KBM) 74.000.000,00	1.480.000	1.480.000
89	Kendaraan Bermotor (KBM) 75.000.000,00	1.500.000	1.500.000
90	Kendaraan Bermotor (KBM) 76.000.000,00	1.520.000	1.520.000
91	Kendaraan Bermotor (KBM) 77.000.000,00	1.540.000	1.540.000
92	Kendaraan Bermotor (KBM) 78.000.000,00	1.560.000	1.560.000
93	Kendaraan Bermotor (KBM) 79.000.000,00	1.580.000	1.580.000
94			

REPUBLIC OF INDONESIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DEPARTMENT OF DEFENSE
 KEMENTERIAN PERTAHANAN
 REPUBLIC OF INDONESIA
 DEPT. OF DEFENSE
 DEPARTMENT OF DEFENSE
 REPUBLIC OF INDONESIA
 2012
 REVENUE STRATEGIC PERTAHANAN RESAPTA TAHUN 2013

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
 PENDANGUNAN PUSAT MISI PENJAGA PERDAMAIAN (PMPP) DAN STAND BY FORCE (SDF)
 TAHUN 2010-2013

NO	URAIAN	RENCANA PEMBAYUNAN						
		2010	2011	2012	2013	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	
A.	PMPP	82.736.950.000	282.932.216.693	40.000.000.000	230.977.180.000	635.645.345.693		
1.	Perawatan	15.881.069.000	40.314.925.836		46.377.431.940			
2.	Perawatan Logistik	3.636.370.000	36.479.521.333					
3.	Perawatan Pendidikan	77.069.000	11.533.580.491					
4.	Pengabdian	6.271.570.000			25.024.562.100			
5.	Mess		25.233.448.200		50.256.896.100			
6.	Facilities Umum / Sosial	4.893.874.000	15.966.726.500		13.959.726.000			
7.	Sampah	34.343.694.000	101.517.651.000	40.000.000.000	92.181.443.000			
8.	Alamiah		33.000.000.000					
B.	SDF				125.000.000.000	125.000.000.000		
	Rendah PMPP & SDF TA				125.000.000.000			
C.	BIAYA PENGADAAN	183.643.050.000				183.643.050.000		
	TOTAL A+B+C	266.380.000.000	282.932.216.693	40.000.000.000	355.977.180.000	945.289.396.693		

MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 PURNOMO YUSDIANTORO